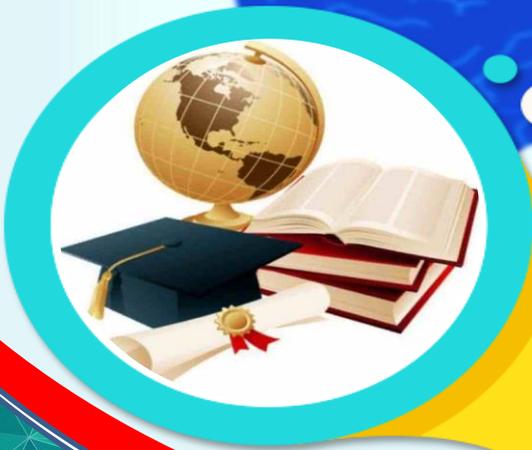
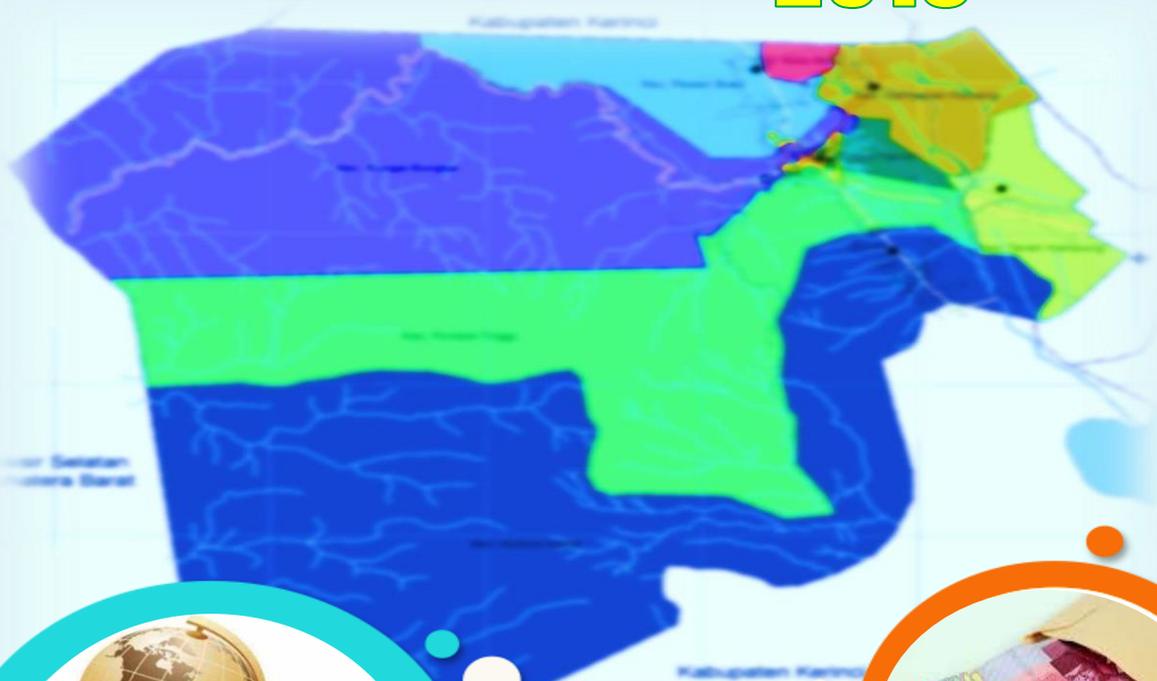




PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau daerah dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai suatu alat untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia antar daerah, keberadaan IPM sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan jika memungkinkan sampai tingkat kecamatan sangat diperlukan. Melalui kajian IPM Kota Sungai Penuh dapat digambarkan dengan jelas pada indikator mana suatu wilayah dapat dikategorikan berada pada kondisi yang baik atau buruk.

Melalui data/informasi yang disajikan dalam dokumen ini diharapkan Pemerintah Daerah dan juga konsumen data secara umum dapat mengetahui garis besar gambaran tentang pencapaian program pembangunan di Kota Sungai Penuh. Diharapkan juga dengan adanya informasi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka membuat suatu perencanaan pembangunan di bidang peningkatan pemberdayaan manusia. Selain itu, dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan program pembangunan selanjutnya.

Dokumen ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak sehingga terwujudnya dokumen ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan dokumen yang akan datang.

Sungai Penuh, 2019
KEPALA BAPPEDA
KOTA SUNGAI PENUH,



JONI ZEBER, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19730923 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IPM	I - 2
BAB II KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	II - 1
2.1 Konsep Pembangunan Manusia	II - 1
2.2 Menerjemahkan Konsep Pembangunan	II - 3
BAB III METODOLOGI PENGHITUNGAN	III - 1
3.1 Indeks Pembangunan Manusia	III - 2
3.1.1 Angka Harapan Hidup	III - 2
3.1.2 Tingkat Pendidikan	III - 3
3.1.3 Standar Hidup Layak	III - 4
3.2 Penghitungan IPM	III - 5
3.3 Ukuran Perkembangan IPM	III - 7
BAB IV GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	IV - 1
4.1 Keadaan Geografis Daerah	IV - 1
4.1.1 Batas Administrasi Daerah	IV - 1
4.1.2 Luas Wilayah	IV - 3
4.2 Demografi	IV - 4
3.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	IV - 4
3.2.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	IV - 5
3.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Sex Rasio	IV - 7
4.3 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	IV - 9
4.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	IV - 9
BAB V KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH	V - 1
5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sungai Penuh.....	V - 1
5.2 Perkembangan Komponen IPM di Kota Sungai Penuh	V - 2
5.2.1 Aspek Harapan Hidup (AHH)	V - 2
5.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	V - 3
5.2.3 Daya Beli	V - 5
5.3 Pembangunan Kapabilitas Dasar	V - 8
5.3.1 Pencapaian Program Pendidikan	V - 8
5.3.1.1 Angka Melek Huruf.....	V - 9
5.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah	V - 10

5.3.2	Akses Pada Layanan Kesehatan Dasar	V - 11
5.3.2.1	Pelayanan Kesehatan di Kota Sungai Penuh.....	V - 11
BAB VI	Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh dan Perbandingan Antar Daerah	VI - 1
6.1	Capaian IPM Kabupaten/Kota	VI - 1
6.2	Perbandingan IPM di Sekitar Wilayah Kota Sungai Penuh	VI - 2
6.3	Perbandingan Perkembangan IPM	VI - 5
BAB VII	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN	VII - 1
7.1	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	VII - 2
7.3	Perubahan Garis Kemiskinan	VII - 3
7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	VII - 4
BAB VIII	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	VII - 1
8.1	Konsep Ketenagakerjaan	VIII - 1
8.2	Perkembangan Variabel-Variabel Ketenagakerjaan	VIII - 2
8.2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	VIII - 2
8.2.2	Pengangguran	VIII - 6
8.2.3	Distribusi sektoral Penyerapan Tenaga Kerja	VIII - 7
8.2.4	Status Pekerjaan	VIII - 8
8.3	Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja	VIII - 9
BAB IX	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	IX - 1
9.1	Kesimpulan	IX - 1
9.2	Implikasi Kebijakan	IX - 2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal
Tabel 3.1	Jenjang Pendidikan dan Skor yang digunakan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah.....	III - 3
Tabel 3.2	Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM yang digunakan dalam Penghitungan.....	III - 5
Tabel 1.3	IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	IV - 1
Tabel 4.2.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan 2018.....	IV - 5
Tabel 4.2.2	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan 2018.....	IV - 6
Tabel 4.2.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	IV - 8
Tabel 4.3.1	Pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh 2016 -2018.....	IV - 9
Tabel 5.1	IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	V - 1
Tabel 5.2.3	Pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	V - 7
Tabel 6.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah.....	VI - 2
Tabel 6.2	Indeks Pembangunan Manusia di Sekitar Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2018.....	VI - 5
Tabel 6.3	Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kota Sungai Penuh	VI - 6
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2016-2018.....	VII - 3
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2018.....	VII - 4
Tabel 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jambi Menurut Daerah Tahun 2016-2018.....	VII - 5
Tabel 7.3	Pearson Correlation IPM dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VII - 6
Tabel 8.2.1	Penduduk Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VIII - 3
Tabel 8.2.1	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VIII - 3
Tabel 8.2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VIII - 6
Tabel 8.2.3	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sungai Penuh Tahun 2018..	VIII - 7
Tabel 8.2.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VIII - 9
Tabel 8.3	Pearson Correlation IPM dan Persentase Pekerja Sektor Formal di Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	VIII - 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Hal
Gambar 3.2	Teknis Penghitungan IPM.....	III - 7
Gambar 3.3	Klasifikasi Nilai IPM Menurut Statusnya.....	III - 8
Gambar 4.1.1	Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh.....	IV - 2
Gambar 4.1.2	Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh.....	IV - 3

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Nama Grafik	Hal
Grafik 5.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018.....	V - 3
Grafik 5.2.2	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018 (tahun).....	V - 4
Grafik 5.2.3	Kemampuan Daya Beli Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	V - 6
Grafik 5.3.1.1	Angka Melek Huruf Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2017.....	V - 9
Grafik 5.3.1.2	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2017.....	V - 11
Grafik 6.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2018.....	VI - 6
Grafik 6.2	Wilayah Provinsi Jambi dengan IPM Tertinggi Tahun 2017-2018.....	VI - 7
Grafik 7.3	Hubungan Antara IPM dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh.....	VII - 6
Grafik 8.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Pekerja Sektor Formal Tahun 2018.....	VIII - 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Nama Lampiran
-----------------	----------------------

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2010-2018 |
| Lampiran 2 | Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi 2016-2018 |
| Lampiran 3 | Angka Harapan Hidup (AHH) 2016-2018 |
| Lampiran 4 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2016-2018 |
| Lampiran 5 | Daya Beli Tahun 2016-2018 |
| Lampiran 6 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota Dan Kelompok Umur Sekolah Provinsi Jambi 2016-2018 |
| Lampiran 7 | Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara parsial, keberhasilan kinerja pembangunan dapat dinilai dari seberapa besar persoalan paling mendasar dapat diatasi, seperti angka kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Persoalan ini menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran dapat digunakan namun barangkali tidak standar karena tidak bisa dibandingkan antar daerah atau negara. Maka Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu ukuran standar, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini dibentuk dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.

Indikator Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator Kemampuan Daya Beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Dengan begitu luasnya cakupan dari pembangunan manusia, maka peningkatan IPM sebagai manifestasi pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of people*). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan diperlukan untuk menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Diketahui beberapa faktor penting dari hasil pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang

perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara terbukti bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia harus diperhatikan dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh Korea Selatan yang konsisten melaksanakan dua hal tersebut sukses dalam meningkatkan pembangunan manusianya.

Pemerintah saat ini tampaknya sangat *concern* dengan pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Kemahalan Konstruksi. Seyogianya daerah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya, karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meski demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian cukup menarik melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini di Kota Sungai Penuh. Selain itu menarik juga untuk melihat perkembangan masing-masing komponen dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IPM

Tujuan penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2019 adalah:

1. Menyajikan data dan informasi tentang penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh.
2. Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

3. Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
4. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
5. Dapat mengembangkan Koordinasi dan Komitmen dalam Pembangunan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Masyarakat, Swasta serta Lembaga-lembaga lain.
6. Meningkatkan capaian kualitas perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
7. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh.

BAB 2

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat di atas merupakan kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Untuk menghindari salah pengertian, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar perlu diperjelas.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih mementingkan pada peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung memperlakukan manusia alat bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima bukan sebagai agen dari suatu perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan Manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama:

Produktivitas. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan hingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

Keberlanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya; fisik, manusia, alam harus dapat diperbaharui.

Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata untuk semua orang. Semua orang

harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

(HDR 1995, hal 12).

Dengan peningkatan kemampuan, kreativitas, dan produktivitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besarnya, tetapi juga pertumbuhan yang seperti apa.

2.2. Menerjemahkan Konsep Pembangunan

Dimasukkannya konsep IPM ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan. IPM juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDB per kapita.

Setelah pemerintah melimpahkan sebagian besar aktivitas pembangunan ke kabupaten/kota, sebagian besar pejabat daerah harus menghadapi tugas untuk meningkatkan pembangunan manusia di daerahnya. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, mereka harus memahami kaitan antara konsep pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kebebasan menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek kehidupan sangat sulit diukur atau dikumpulkan datanya. Bahkan sangat sulit memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks tunggal.

Oleh karenanya daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan prinsip-prinsip utamanya, daripada hanya memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya, meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama pembangunan. Misalnya, daripada meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau meningkatkan perekonomian, selayaknya pejabat dan pegawai daerah membantu masyarakat di daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan atau pemberian lisensi penambangan harus bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

BAB 3

METODOLOGI PENGHITUNGAN

Dalam menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP Rupiah).

Metodologi IPM mengalami perubahan dari sebelumnya. Ada beberapa dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selanjutnya, PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Indikator yang berubah adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Kemudian, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Beberapa keunggulan dari IPM Metode Baru yaitu menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan

dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara/daerah, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir; Pengetahuan, dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan Standar Hidup Layak, dengan indikator Pengeluaran per kapita disesuaikan.

3.1.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka Harapan Hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan untuk menghitung angka harapan hidup, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH), dan Anak Masih Hidup (AMH).

Penggunaan angka harapan hidup atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan hasil dari beberapa indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi dan lain lain, oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

3.1.2 Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Terhadap perubahan komponen penghitungan dimana pendekatan sebelumnya menggunakan indeks angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas, diubah menjadi indeks harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Perubahan tersebut mengikuti perubahan penghitungan, metodologi penghitungan oleh UNDP pada tahun 2010.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i \cdot LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Keterangan :

MYS: Rata-rata lama sekolah (dalam tahun) **LSi** : Si (bila tamat)

- f_i*** : Frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan *i*..
- S_i*** : Skor masing-masing jenjang pendidikan *i*.
- LS_i*** : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)
- LS_i*** : *S_i* + kelas yang diduduki – 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
- LS_i*** : Kelas yang diduduki – 1 (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)
- i*** : Jenjang Pendidikan (1,2,3,...,10)

Tabel 3.1.2
Jenjang Pendidikan dan Skor yang digunakan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah

Jenjang Pendidikan	Skor
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

Sumber : BPS 2019

3.1.3 Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai *Purchasing Power Parity (PPP)* yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas modul konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Selain itu, ada penambahan jumlah komoditas yang dikonsumsi semula 27 komoditas menjadi 96 komoditas

dengan perincian 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan dengan formula sebagai berikut.

$$PPP_i = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan

P_{ik} : Harga Komoditas *i* di Jakarta Selatan

P_{ij} : Harga komoditas *i* di Kab/Kota *j*

m : Jumlah komoditas

3.2 Penghitungan IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I(1) \times I(2) \times I(3)}$$

Keterangan :

I(1) : Indeks harapan hidup

I(2) : Indeks pendidikan = 1/2 (indeks harapan lama sekolah) +
1/2 (indeks rata-rata lama sekolah).

I(3) : Indeks paritas daya beli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisar antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } I(i) = \frac{X(i) - X(i)_{min}}{X(i)_{maks} - X(i)_{min}} \times 100$$

Keterangan :

X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i)

X(i)min : Nilai minimum X(i)

Khusus untuk **I(3)** atau indeks paritas data beli, setiap X harus dilogaritma naturalkan (*ln*) terlebih dahulu, sehingga masing-masing menjadi: **In(X(3))**, **In(X(3)min)**, dan **In(X(3)max)**.

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen di atas. Komponennya adalah kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan usia harapan hidup (*life expectancy at Age 0; e0*), pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*) serta indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *purchasing power parity*/paritas daya beli. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan pendekatan pengeluaran perkapita penduduk.

Tabel 3.2
Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM yang digunakan dalam Penghitungan

Komponen IPM [=X(i)]	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	Standar UNDP
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352*	1.007.436**	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

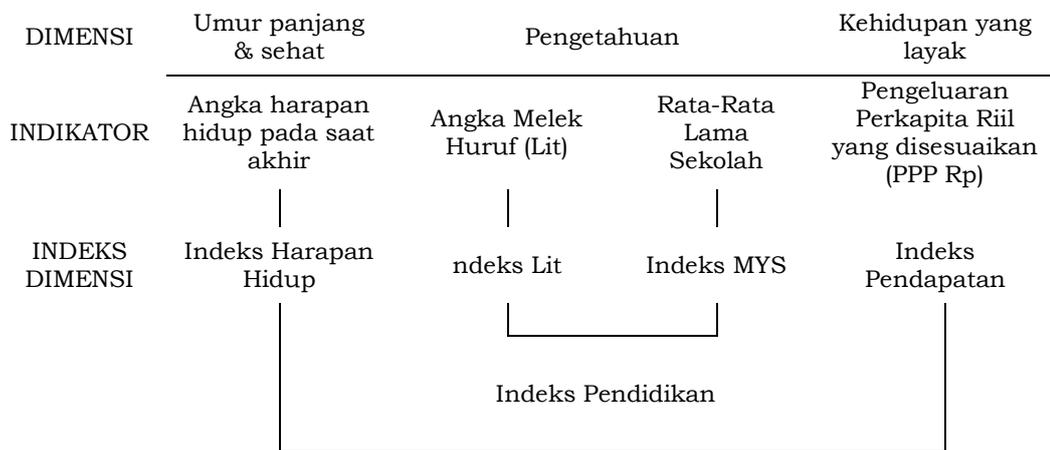
Keterangan :

*) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Kabupaten Tolikara, Papua.

***) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran perkapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Sumber : BPS 2019

Gambar 3.2
Teknis Penghitungan IPM



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

3.3 Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi *shortfall* per tahun (*annual reduction in shortfall*). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi *shortfall* IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{(IPM_{(t+n)} - IPM_t) \times 100}{IPM_{ideal} - IPM_t}$$

Dimana,

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t+n} : IPM pada tahun t+n

IPM_{ideal} : 100

Perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/Kota dapat dibedakan pada 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti di bawah ini:

Tabel 3.3
Klasifikasi Nilai IPM Menurut Statusnya

No	Nilai IPM	Status Perkembangan Manusia
(1)	(2)	(3)
1	< 50	Rendah
2	$50 \leq IPM < 66$	Menengah bawah
3	$65 \leq IPM < 80$	Menengah atas
4	$IPM \geq 80$	Tinggi

Sumber: BPS

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal, maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

Contoh Penghitungan IPM

Contoh penghitungan IPM untuk Kota Sungai Penuh tahun 2018 :

No	Indikator	Satuan	Nilai
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,84
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,77
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,84
4.	Pengeluaran Per Kapita yang telah D disesuaikan	Ribu Rp	10.186.000

- Indeks Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \times 100$$

$$I_{Kesehatan} = \frac{71,84 - 20}{85 - 20} \times 100 = 84$$

- Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \times 100 = \frac{14,77 - 0}{18 - 0} \times 100 = 82$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \times 100 = \frac{9,84 - 0}{15 - 0} \times 100 = 65,6$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} = \frac{82 + 65,6}{2} = 73,8$$

- Indeks Pengeluaran

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

$$I_{Pengeluaran} = \frac{10.186.000 - 1.007.436}{26.572.532 - 1.007.436} \times 100 = 38$$

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :9178564;25565096
0,35902717**

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}}^f \times I_{\text{pendidikan}}^f \times I_{\text{pengeluaran}}^f}$$

$$\sqrt[3]{84 \times 73,8 \times 38} = 61,76$$

4425027.55 16

BAB IV

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

4.1 Kondisi Geografis Daerah

4.1.1 Batas Administrasi Daerah

Kota Sungai Penuh terletak di antara $101^{\circ} 14' 32''$ BT sampai dengan $101^{\circ} 27' 31''$ BT dan $02^{\circ} 01' 40''$ LS sampai dengan $02^{\circ} 14' 54''$ LS. Sedangkan secara geografis Kota Sungai Penuh berada dalam lingkup Kota Sungai Penuh di bagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kota Sungai Penuh sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan:

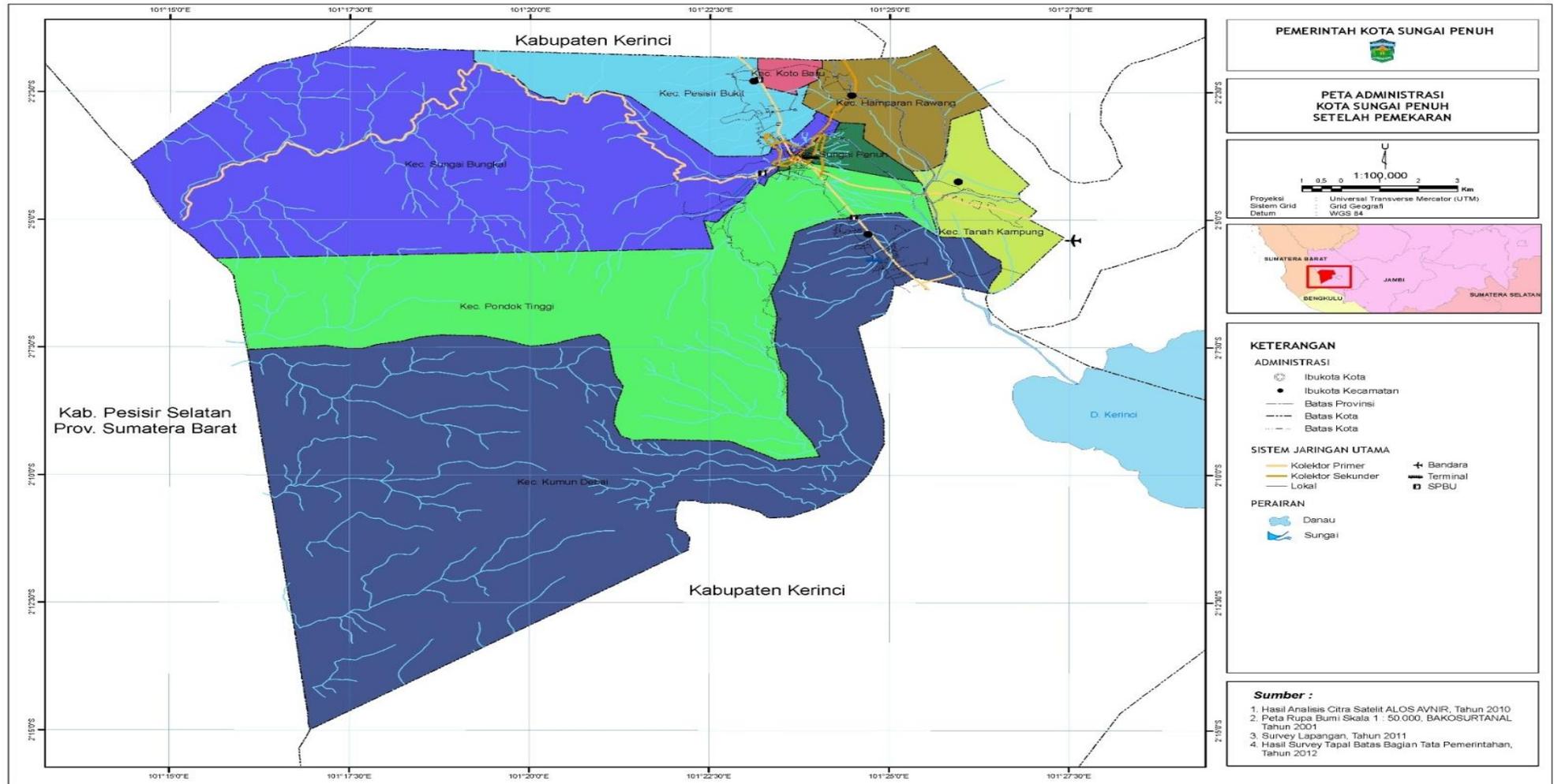
Sebelah utara : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec.
Air Hangat Timur Kab. Kerinci

Sebelah Selatan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci

Sebelah Barat : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar

Sebelah Timur : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau
Laut Kab. Kerinci.

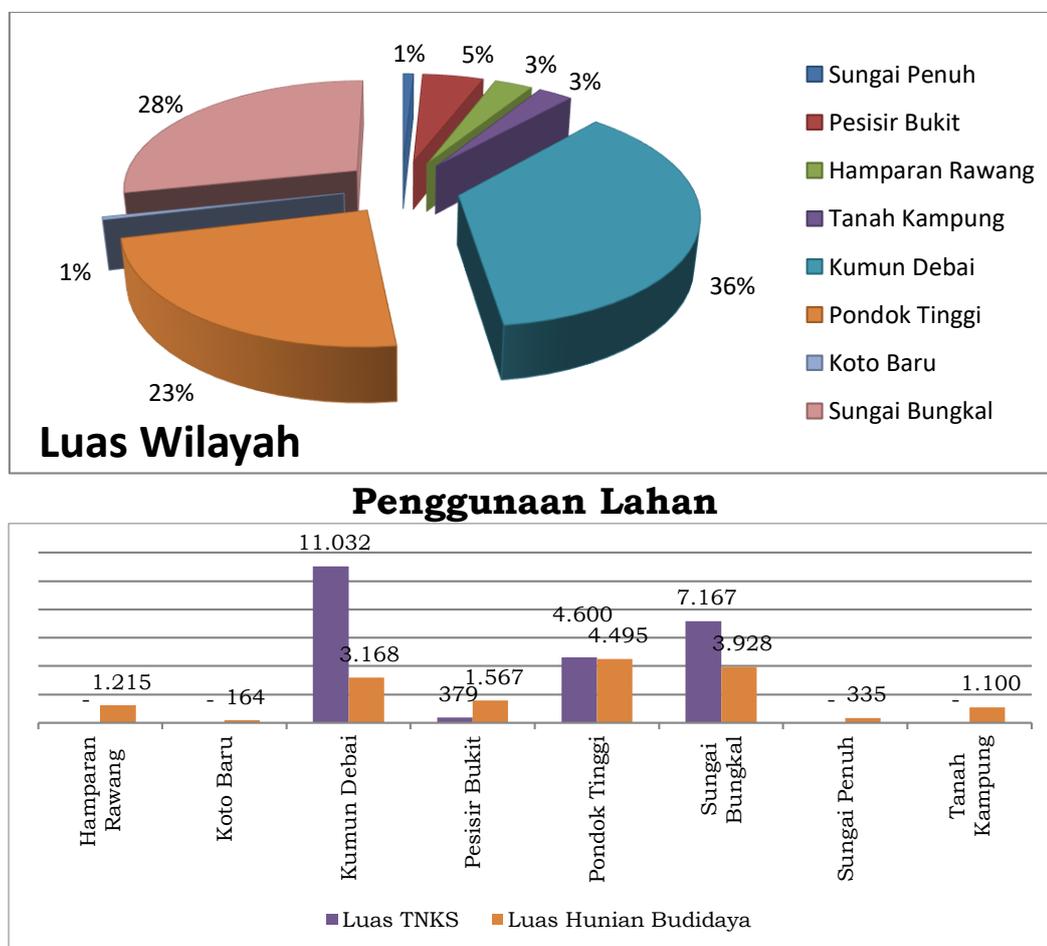
Gambar 4.1.1
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh



4.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Sungai Penuh adalah sebesar 391,5 Km² (39.150 Ha), atau 0,78% dari luas Provinsi Jambi, yang terdiri dari TNKS seluas 231.177,6 Km² (59,2 %) dan lahan hunian budidaya seluas 159,7 Km² (40,8 %). Kota Sungai Penuh yang beribukota di Sungai Penuh sejak tahun 2012 terbagi dalam 8 Kecamatan (semula 5 Kecamatan), 65 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling besar adalah Kecamatan Kumun Debai dengan luas 14.200 Ha atau 36,27% dari total luas Kota Sungai Penuh. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Koto Baru dengan luas 164 Ha atau 0,42% dari luas wilayah keseluruhan.

Gambar 4.1.2
Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh

4.2 Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar suatu pembangunan. Selain itu, penduduk juga menjadi objek dari pembangunan. Namun, seperti yang kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya, masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah yang masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan selain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri, justru hanya akan menjadi permasalahan yang merupakan awal bagi masalah-masalah berikutnya. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul dengan tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah menambah jumlah pengangguran karena terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang berdampak makin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat dsb.

4.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 berkurang dari tahun 2017, dari 104.204 jiwa pada tahun 2017 menurun menjadi 100,934 jiwa pada tahun 2018. Berkurang 2,18 persen atau 2.270 jiwa. Berkurangnya jumlah penduduk tahun 2018 ini berbagai faktor yang mempengaruhinya salah satunya seperti masih adanya penduduk ber KTP ganda, yang sudah didata ulang, kematian dan pindah penduduk.

Penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk adalah sebanyak 100.934 jiwa yang terdiri atas 50.782 jiwa penduduk laki laki dan 50.152 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk dari tahun 2010 hasil proyeksi, penduduk Kota Sungai Penuh mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen.

Kepadatan penduduk di Kota Sungai Penuh tahun

2018 mencapai 229,74 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 224,70 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Koto Baru dengan kepadatan sebesar 5269,51 jiwa/km².

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 4.2.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan 2018

No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2010 ²	2018	2010 - 2018
1.	Tanah Kampung	8425	8790	0,53
2.	Kumun Debai	8448	8632	0,27
3.	Sungai Penuh	9773	10085	0,39
4.	Pondok Tinggi	15796	17521	1,30
5.	Sungai Bungkal	9632	10303	0,85
6.	Hampanan Rawang	12781	14381	1,49
7.	Pesisir Bukit	9997	11590	1,87
8.	Koto Baru	7767	8642	1,34
	Kota Sungai Penuh	82619	89944	1,07

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 dan 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan.

4.2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang merata merupakan suatu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan jika persebaran penduduk tidak merata berarti

pembangunan juga tidak merata. Untuk itu, masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dirasa perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar wilayah. Kepadatan penduduk merupakan indikator dalam mengetahui persebaran penduduk. Kepadatan penduduk terbagi 3, yaitu kepadatan penduduk kasar, kepadatan penduduk fisiologis, dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran yang umum digunakan, karena selain kemudahan dalam penghitungan, juga data yang dibutuhkan sederhana.

Tabel 4.2.2
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan 2018

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per Km ²	
		2010	2018	2010	2018
1.	Tanah Kampung	10,20	9,77	765,91	799,09
2.	Kumun Debai	10,23	9,60	59,49	60,79
3.	Sungai Penuh	11,83	11,21	2917,31	3010,45
4.	Pondok Tinggi	19,12	19,48	173,68	192,64
5.	Sungai Bungkal	11,66	11,45	86,81	92,86
6.	Hampanan Rawang	15,47	15,99	1051,93	1183,62
7.	Pesisir Bukit	12,10	12,89	513,72	595,58
8.	Koto Baru	9,40	9,61	4735,98	5269,51
	Kota Sungai Penuh	100	100	211,03	229,74

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

Pada tahun 2018 diketahui kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh sebesar 229,74 penduduk per Km², meningkat dari tahun 2010 sebesar 211,03. Sedangkan persebaran penduduk di kecamatan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya pemekaran kecamatan, dari 5 (lima) kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan. Dari delapan kecamatan, terlihat penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pondok Tinggi, yaitu

sebanyak 19,48%. Namun, jika dilihat dari kepadatan penduduk per km², penduduk terpadat berada di Kecamatan Koto Baru, yaitu sebesar 5269,51 jiwa/Km². Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah Kecamatan Koto Baru yang merupakan wilayah terkecil dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu hanya 164 Ha.

4.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Sex Rasio

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sex ratio (rasio jenis kelamin) merupakan perbandingan jumlah pria dengan 100 wanita. Jika angka *sex ratio* (SR) > 100, berarti jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sebaliknya jika SR < 100 berarti jumlah perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di Kota Sungai Penuh berada dibawah 100. Yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Tabel 4.2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Tanah Kampung	4339	4451	8790	97,48
Kumun Debai	4277	4355	8632	98,21
Sungai Penuh	5005	5080	10085	98,52
Pondok Tinggi	8736	8785	17785	99,44
Sungai Bungkal	5231	5072	10303	103,13
Hampanan Rawang	7077	7304	14381	96,89
Pesisir Bukit	5594	5996	11369	93,30
Koto Baru	7077	7034	14381	101,77
Kota Sungai Penuh	50782	50152	100934	98,44

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

Dari tabel kependudukan di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Penggambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin, yang biasanya menggunakan *sex ratio* (rasio jenis kelamin), berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

4.3 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh difokuskan pada pemerataan ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi dilihat dari pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita.

4.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pemerataan ekonomi di Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan.

Tabel 4.3.1
Pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh 2016 -2018

Lapangan Usaha	PDRB atas harga konstan (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,42	5,42	5,20
B. Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,85	0,83
C. Industri Pengolahan	0,64	0,65	0,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,32	0,30
F. Konstruksi	11,32	11,10	11,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,41	29,09	29,36
H. Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,07	3,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,16	1,14
J. Informasi dan Komunikasi	13,83	14,33	14,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,80	4,90	4,86

Lapangan Usaha	PDRB atas harga konstan (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018
L. Real Estate	2,93	2,89	2,86
M,N. Jasa Perusahaan	5,62	5,82	5,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,44	6,51
P. Jasa Pendidikan	9,39	9,56	9,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,24	2,26
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,10	2,13	2,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2018 – BPS

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sungai Penuh atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4.425,03 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 4.192,57 miliar rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,24 persen

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya peningkatan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dari tahun ke tahun. Perdagangan Kota Sungai Penuh mencakup kebutuhan Kota Sungai Penuh dan kabupaten tetangga. Dimana kontribusi pada tahun 2017 sebesar 29,09 persen meningkat menjadi 29,36 persen pada tahun 2018.

BAB 5

KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH

5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Sungai Penuh

Pembangunan manusia adalah proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara. Dengan demikian IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi. BAB ini akan membahas mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kota Sungai Penuh selama 3 tahun terakhir ini, yaitu selama kurun waktu 2016-2018.

Tabel 5.1
IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,66	71,71	71,84
Harapan Lama Sekolah	14,75	14,76	14,77
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,33	9,55	9,84
Pengeluaran Perkapita(Rp. 000)	9604	9707	10186
IPM	73,35	73,75	74,67

Sumber : BPS 2019

Dari Tabel 5.1 terlihat bahwa secara umum pembangunan manusia di Kota Sungai Penuh selama tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Kota Sungai Penuh tercatat 73,35. Seiring dengan membaiknya perekonomian, IPM secara perlahan naik mencapai 73,75 pada tahun 2017 atau naik sebesar 0,40 poin, kemudian meningkat mencapai 74,67 pada tahun 2018 atau naik sebesar 0,92 poin, sehingga menempatkan Kota Sungai Penuh pada peringkat ke 2 dengan IPM tertinggi se-Provinsi Jambi.

Meningkatnya IPM selama periode 2016-2018 tidak terlepas dari membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen IPM. Konkritnya, Angka Harapan Hidup,

Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Riil Per Kapita semuanya meningkat. Peningkatan komponen IPM secara berturutan dari yang tertinggi adalah Rata-Rata Lama Sekolah (0,29 poin), Pengeluaran perkapita (479 poin), Angka Harapan Hidup (0,13 poin), dan Harapan Lama Sekolah (0.01 poin).

Artinya percepatan IPM periode 2016-2018 meningkat. Maka kualitas penduduk pada periode tersebut semakin membaik. Menurut UNDP, terdapat empat (4) kategori yang mengelompokkan status pembangunan suatu wilayah. Kategori tersebut meliputi status pembangunan rendah (IPM kurang dari 50.00), menengah bawah (IPM antara 50.00-65.99), menengah atas (IPM antara 66.00-79.99), dan tinggi (IPM lebih dari 80). Jika dilihat dari sisi pengkategorian IPM menurut skala tersebut, maka IPM Kota Sungai Penuh secara berturut-turut dari tahun 2016-2018 sudah berada pada kategori menengah atas (73,35, 73,75, dan 74,67).

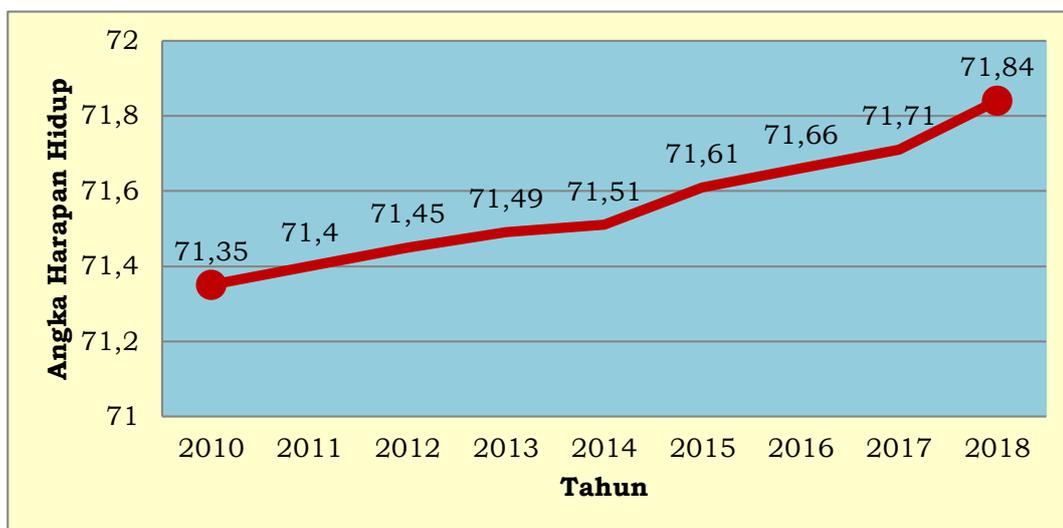
5.2 Perkembangan Komponen IPM di Kota Sungai Penuh.

5.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Aspek kesehatan juga merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum. Gambar 4.2.1 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 2010-2018.

Grafik 5.2.1
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sungai Penuh
Tahun 2010-2018



Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

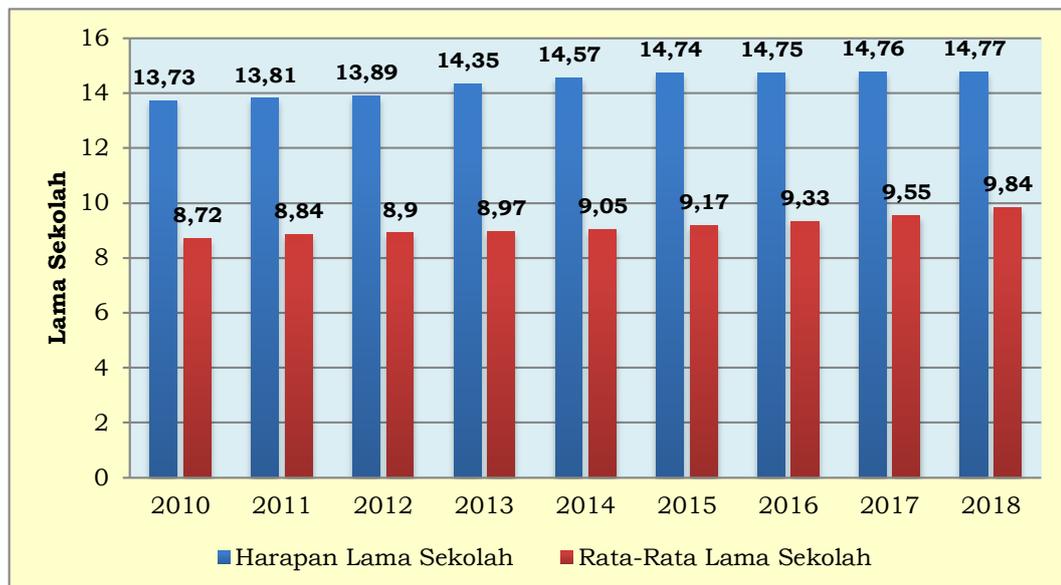
Pada tahun 2010 hingga 2018, AHH Kota Sungai Penuh terus meningkat, dari 71,35 hingga 71,84 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Sungai Penuh dapat hidup sampai dengan usia 71 tahun 3 bulan pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2018 secara rata-rata dapat hidup sampai usia 71 tahun 8 bulan. Adanya peningkatan angka harapan hidup menandakan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini, yang dapat digunakan untuk mengukur capaian atau kinerja pemerintah di bidang kesehatan.

5.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam bentuk IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2018 sebesar 14,77. Artinya seorang anak usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 14,77 tahun, atau minimal hingga semester 5 pada perguruan tinggi. Angka HLS Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka HLS tercatat sebesar 13,73 tahun.

Selanjutnya rata-raa lama sekolah, memberikan informasi tentang tingkat pendidikan rata-rata yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sebesar 9,84 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 9,55 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Sungai Penuh secara rata-rata telah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA kelas 1. Program nasional wajib belajar 12 atau bahkan 9 tahun pun dicanangkan pemerintah nampaknya sulit tergambar hasilnya melalui angka ini. Hal ini masih selalu relevan dengan permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dasar, terlebih jika dikaitkan juga dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan cakupan dari penduduk usia 15 ke atas (metode lama) menjadi 25 tahun ke atas (metode baru) juga menyebabkan penurunan nilai rata-rata lama sekolah.

Grafik 5.2.2
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2018 (tahun)



Sumber: BPS 2019

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Sungai Penuh, yaitu 9.84

tahun pada tahun 2018 yang berarti bahwa penduduk Kota Sungai Penuh rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SMA.

Terlihat di sini bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah atau MYS pada periode 2016-2017 sebesar 0.22 tahun, kemudian pada periode 2017-2018 terjadi peningkatan sebesar 0,29 tahun. Jika dikaitkan dengan target minimal yang diusulkan UNDP (15 tahun), maka rata-rata pendidikan penduduk Kota Sungai Penuh sudah maju. Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya tetap bersekolah perlu terus ditingkatkan agar tercipta SDM berkualitas.

5.2.3 Daya Beli

Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup manusia, indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada serta untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produksi sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada akan menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya yang dilihat dari segi ekonomi. Distribusi pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (daya beli). Di negara berkembang

dengan tingkat gizi yang masih rendah, pemenuhan kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar untuk hidup masih merupakan prioritas utama.

Grafik 5.2.3
Kemampuan Daya Beli Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2018

Pengeluaran Perkapita Kota Sungai Penuh tahun 2018 sebesar 10186. Pengeluaran tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 pengeluaran perkapitan Kota Sungai Penuh sebesar 9604, tahun 2017 sebesar 9707, dan pada tahun 2018 sebesar 10186. Pengeluaran Perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan indikasi perekonomian Kota Sungai Penuh kini tengah menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini juga menunjukkan daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan seiring perbaikan kondisi ekonomi.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan penduduk merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk melakukan akses terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya ada hubungannya dengan variabel yang mempengaruhi sub komponen pendapatan, terdapat beberapa variabel yang disinyalir sangat kuat dalam mempengaruhi pertumbuhan

kemampuan daya beli masyarakat, variabel sub komponen pendapatan tersebut adalah:

1. Produktivitas: PDRB per kapita.
2. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
3. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sector sekunder.
4. Status pekerjaan.

Kemampuan daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang cukup baik pula. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari PDRB wilayah yang bersangkutan. Perkembangan nilai PDRB Kota Sungai Penuh tahun 2017 apabila dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2018 masing-masing terlihat terjadi peningkatan dan kenaikan sebagai berikut :

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp. 3.946.467,11 juta, di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.246.098,11. Pada tahun 2018 naik lagi sebesar Rp.4.425.027,55.

Tabel 5.2.3
Pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018

Lapangan Usaha	PDRB atas harga konstan (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	235062.09	228572.17	241211.79
B. Pertambangan dan Penggalian	33267.81	35722.40	37954.19
C. Industri Pengolahan	27806.03	29618.04	31610.56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	966.72	979.02	992.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14204.57	14585.82	14929.58
F. Konstruksi	517488.07	549520.59	576151.62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1011693	1082684.04	1149681.55
H. Transportasi dan Pergudangan	146115.39	156797.32	166668.02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45166.45	47892.37	50759.48

Lapangan Usaha	PDRB atas harga konstan (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018
J. Informasi dan Komunikasi	582503.30	625230.24	659751.52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	201388.12	219317.86	230195.05
L. Real Estate	110091.50	116474.98	122170.91
M,N. Jasa Perusahaan	230883.53	250726.37	266360.76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	224364.08	230098.16	240984.03
P. Jasa Pendidikan	369983.87	397041.17	417469.85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101712.41	107350.49	112950.68
R,S,T,U. Jasa lainnya	93770.16	99954.18	105185.94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3946467.11	4192565.22	4425027.55

5.3 Pembangunan Kapabilitas Dasar

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup penduduk sehingga setiap individu mempunyai peluang untuk dapat berumur panjang dan sehat serta memiliki kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pendidikan.

Dalam laporan ini capaian pada pendidikan tidak diukur dengan faktor intelegensia tetapi diukur dengan pendidikan formal yang dijalani. Selanjutnya pada faktor kesehatan diukur dengan angka harapan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

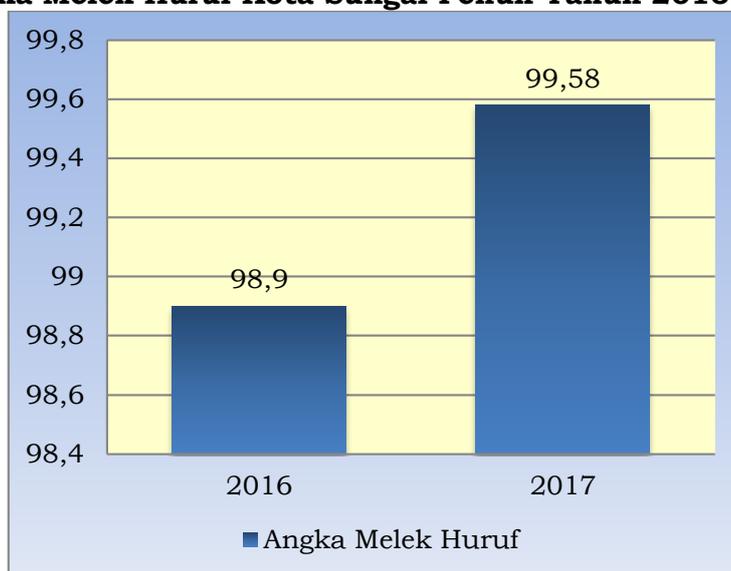
5.3.1 Pencapaian Program Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan kapabilitas dasar manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan pengetahuan. Upaya peningkatan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melalui Program Wajib Belajar 9 tahun. Untuk mengetahui kondisi terkini kualitas pendidikan di Kota Sungai Penuh, dibahas dua indikator utama pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah (APS).

5.3.1.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH ini digunakan sebagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah. Semakin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di wilayah tersebut. Kesepakatan Dakar menyebutkan bahwa pada tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100 persen.

Grafik 5.3.1.1
Angka Melek Huruf Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2017



Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2018

Angka melek huruf masyarakat Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sebesar 99.58 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se Provinsi Jambi. Angka yang tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

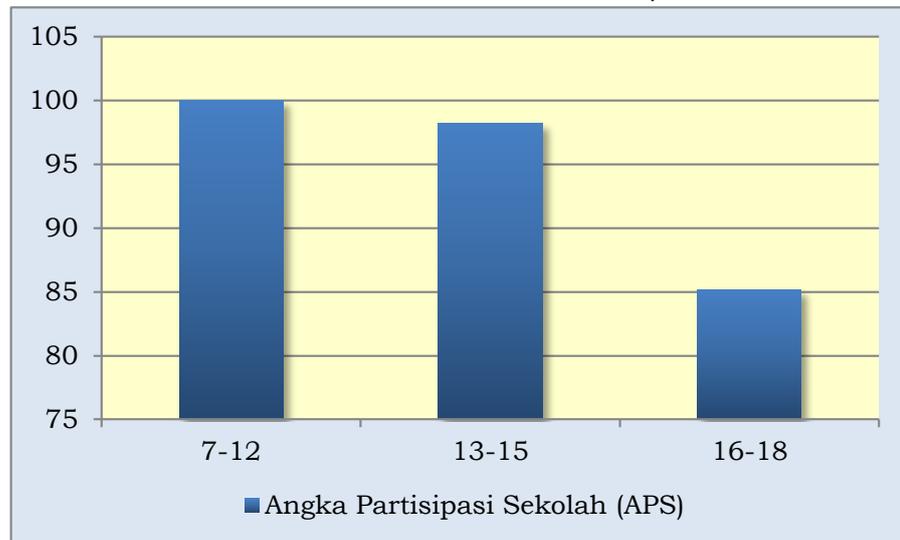
Angka melek huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk membangun sumber daya manusia di masa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/ kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

5.3.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah (7-12, 13-15, dan 16-18) yang bersekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Dengan kata lain APS memfokuskan perhatian pada bersekolahnya anak usia sekolah tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan bersekolah sesuai dengan usianya.

Grafik 5.3.1.2 memperlihatkan pencapaian program Wajar Dikdas 9 tahun maupun program pendidikan sekolah menengah tahun 2018. Tampak di sini penduduk usia SD (7-12) yang sudah bersekolah pada tahun 2018 di Kota Sungai Penuh mencapai 100 persen sedangkan yang berusia SLTP (13-15) 98,19 persen diantaranya telah bersekolah, dan penduduk usia SLTA (16-18) mencapai 85,15%. Dengan demikian rata-rata lama sekolah dapat pula ditingkatkan untuk menaikkan angka IPM.

Grafik 5.3.1.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal
Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sungai Penuh 2018

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Oleh sebab itu, dilihat dari nilai APS maka kelompok umur 7-12 tahun memiliki peluang yang paling besar dalam mengakses pendidikan secara umum disusul oleh kelompok umur 13-15 tahun kemudian kelompok umur 16-18 tahun.

5.3.2 Akses Pada Layanan Kesehatan Dasar

Kesehatan merupakan aspek yang paling penting dan mendasar bagi semua orang. Namun untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik tidak mudah karena banyak faktor berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Selain AHH, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator kesehatan yang erat kaitannya dengan harapan hidup. Tinggi rendahnya AHH dapat dilihat dari pola AKB.

4.3.2.1 Pemanfaatan Fasilitas Dasar Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat penting artinya dalam upaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan masyarakat. Gambaran kesehatan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat berdasarkan banyaknya perempuan yang

menggunakan penolong persalinan tenaga kesehatan, melahirkan di fasilitas kesehatan, dan penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Semua perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Sungai Penuh dapat dikatakan menggunakan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Selain itu, 96 dari 100 perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat persalinan.

Dilihat dari sisi berobat jalan, persentase penduduk Kota Sungai Penuh yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 34,11 persen.

4.3.2.2 Pelayanan Kesehatan di Kota Sungai Penuh

Di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh merupakan kota kedua setelah Kota Jambi dimana pemerintah akan menjaminkan seluruh warganya ke program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya sekaligus wujud ketaatan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Parasuraman (1990) dalam Tjiptono dan Chandra (2016), baik buruknya kualitas pelayanan dapat disebabkan oleh kesenjangan (gap) yang dapat mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa layanan yang dikenal dengan model Servqual (*service quality*), model ini dapat mengalisis gap antara dua variabel pokok, yakni jasa yang diharapkan dan jasa yang dikenyataankan. Model servqual dirancang untuk mengukur harapan dan kenyataan pelanggan serta gap antara keduanya pada lima dimensi utama kualitas jasa yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*. Apabila semua gap tersebut dapat dihilangkan oleh setiap pemberi pelayanan,

maka akan tercapai pelayanan yang berkualitas sehingga memberikan kepuasan konsumen.

BAB VI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH DAN PERBANDINGAN ANTAR DAERAH

6.1 Capaian IPM Kabupaten/Kota

Secara umum, IPM kabupaten/kota menggambarkan kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota. Kinerja pembangunan manusia bisa dinilai berhasil atau gagal berdasarkan capaian angka IPM. Selanjutnya, capaian angka IPM itu akan menentukan urutan (*ranking*) suatu daerah. Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, barangkali tidak mutlak dari urutan posisi (*ranking*), akan tetapi berdasarkan reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia di suatu daerah.

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM Kota Sungai Penuh, IPM kabupaten/kota juga semuanya memperlihatkan peningkatan IPM selama periode 2016-2018. Meski demikian, dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya berbeda. Ada kabupaten/kota menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, ada pula kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan IPM lambat, serta ada pula yang tidak menunjukkan peningkatan.

Tabel 6.1 menyajikan urutan tertinggi dan terendah kabupaten/kota berdasarkan IPM selama periode tahun 2016-2018. Kota Sungai Penuh merupakan peringkat kedua IPM tertinggi setelah Kota Jambi di Provinsi Jambi yaitu 73,35 73,75 dan 74,67. Sementara itu, pada tahun 2016-2018 kabupaten/kota terbawah dengan IPM terendah, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 6.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan Urutan IPM
Tertinggi dan Terendah

Tahun 2016 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2017 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2018 Kabupaten/Kota	IPM
Kota Jambi	76.14	Kota Jambi	76.74	Kota Jambi	77.41
Kota Sungai Penuh	73.35	Kota Sungai Penuh	73.75	Kota Sungai Penuh	74.67
Kerinci	69.68	Kerinci	70.03	Kerinci	70.59
Bungo	68.77	Bungo	69.04	Bungo	69.42
Sarolangun	68.73	Sarolangun	69.03	Sarolangun	69.41
Batanghari	68.7	Batanghari	68.92	Batanghari	69.33
Tebo	68.05	Merangin	68.3	Merangin	68.81
Merangin	67.86	Tebo	68.16	Tebo	68.67
Muara Jambi	67.55	Muara Jambi	67.86	Muara Jambi	68.34
Tanjung Jabung Barat	65.91	Tanjung Jabung Barat	66.15	Tanjung Jabung Barat	67.13
Tanjung Jabung Timur	61.88	Tanjung Jabung Timur	62.61	Tanjung Jabung Timur	63.32

6.2 Perbandingan IPM di sekitar Wilayah Kota Sungai Penuh

Pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa ada peningkatan IPM dari tahun 2016-2018 untuk Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2016, IPM Kota Sungai Penuh 73,35, IPM nomor 2 tertinggi dari kabupaten/kota lainnya dibawah kota Jambi dengan IPM 76,14.

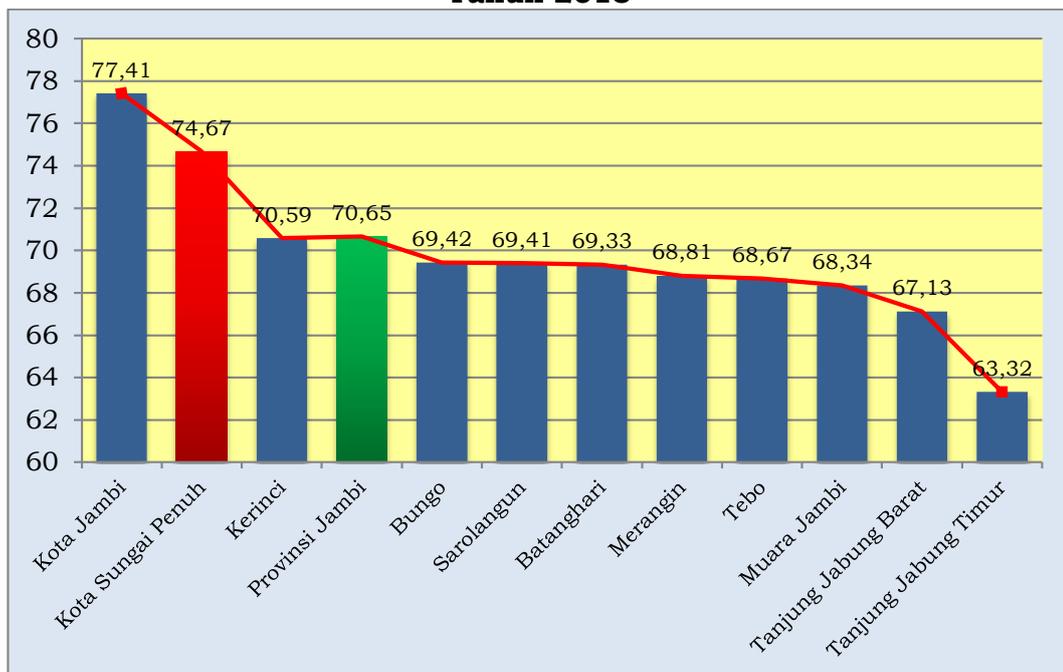
Pada tahun 2017 IPM Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan 0,40 poin yaitu sebesar 73,75 nomor 2 IPM tertinggi Provinsi Jambi dibawah Kota Jambi sebesar 76,74%. Pada tahun 2018 IPM Kota Sungai Penuh tetap mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin yaitu 74,67 nomor 2 IPM tertinggi setelah Kota Jambi sebesar 77,41. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa IPM Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir.

Tabel 6.2
Indeks Pembangunan Manusia di Sekitar Kota Sungai Penuh
Tahun 2017-2018

Kabupaten / Kota	Tahun		Ranking se- Provinsi Jambi
	2017	2018	
Jambi	69.99	70.65	3
Kerinci	70.03	70.59	4
Merangin	68.3	68.81	8
Sarolangun	69.03	69.41	6
Batanghari	68.92	69.33	7
Muara Jambi	67.86	68.34	10
Tanjung Jabung Timur	62.61	63.32	12
Tanjung Jabung Barat	66.15	67.13	11
Tebo	68.16	68.67	9
Bungo	69.04	69.42	5
Kota Jambi	76.74	77.41	1
Kota Sungai Penuh	73.75	74.67	2

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2019

Grafik 6.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi
Tahun 2018



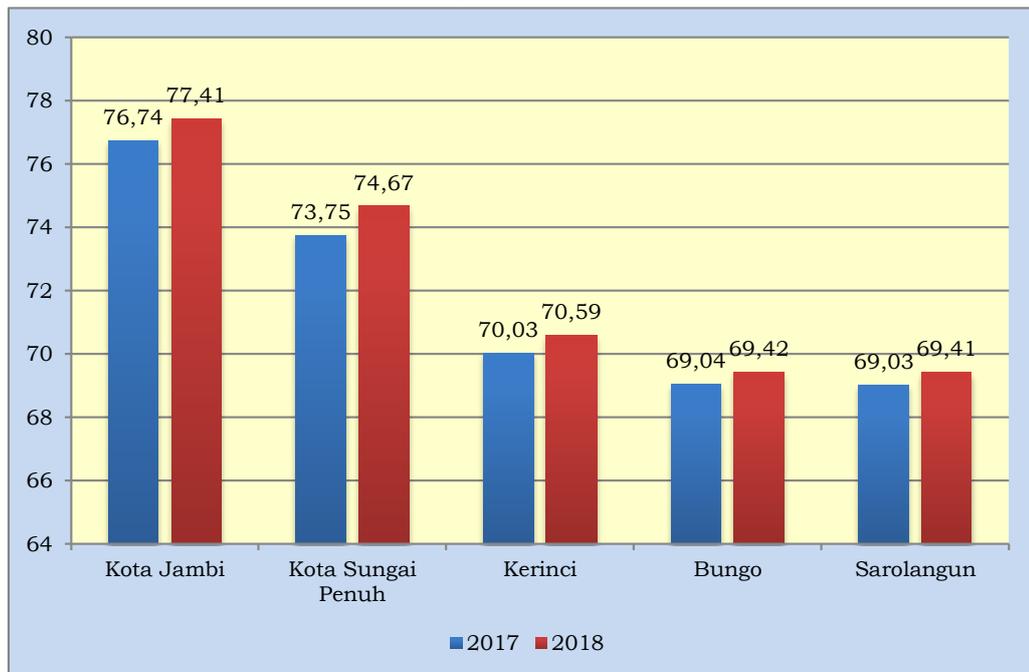
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2019

Secara umum capaian IPM Kota Sungai Penuh dibandingkan dengan kabupaten/kota di tingkat Provinsi Jambi tahun 2017-2018 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kota Jambi menduduki peringkat tertinggi pada capaian pembangunan manusia tahun 2018 dengan nilai IPM sebesar 77,41. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menduduki peringkat terendah dalam pencapaian pembangunan manusia yaitu sebesar 63,32. Kondisi ini IPM ini secara umum tidak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Kota Sungai Penuh memiliki capaian IPM kedua tertinggi setelah Kota Jambi.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, peringkat IPM kabupaten/kota tidak mengalami banyak perubahan. Kota Sungai Penuh terus menduduki urutan kedua teratas dalam pencapaian IPM di Provinsi Jambi. Lima wilayah dengan nilai IPM tertinggi di tahun 2018 masing-masing adalah Kota Jambi di peringkat pertama dengan nilai IPM sebesar 77,41, disusul Kota Sungai Penuh (74,67), Kabupaten Kerinci (70,59), Kabupaten Bungo (69,42), dan Kabupaten Sarolangun (69,41).

Grafik 6.2

Wilayah Provinsi Jambi dengan IPM Tertinggi Tahun 2017-2018



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2019

6.3 Perbandingan Perkembangan IPM

Dalam menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu digunakan reduksi *shortfall* pertahun. Perbandingan komponen IPM tahun 2016-2017 dan 2017-2018 dapat dilihat pada Lampiran 2. Pada Lampiran 2 tersebut nampak bahwa pada periode yang sama, perubahan komponen-komponen IPM bervariasi karena terjadinya penurunan dan peningkatan variabel tersebut. Namun secara umum relatif mengalami peningkatan. *Shortfall* digunakan dalam menentukan kecepatan perkembangan indeks-indeks tersebut. *Shortfall* adalah perbandingan antara capaian yang telah ditempuh pada suatu periode terhadap capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (indeks = 100). *Shortfall* mengindikasikan kecepatan perkembangan “menengah” jika bernilai di atas 1,5 kemudian “cepat” jika di atas 1,7. Rumusnya adalah:

$$r = \frac{I_t - I_{t-1}}{100 - I_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

r : Shortfall

I_t : Indeks pada tahun *t*

I_{t-1} : Indeks pada setahun yang lalu atau pada tahun *t-1*

Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 menunjukkan *shortfall* sebesar 0,93 persen. Artinya, kecepatan perkembangan indeks dari tahun 2017 menuju 2018 adalah sebesar 0,93 persen dari kecepatan maksimal perkembangan indeks dari 2017 menuju 2018 (mencapai indeks ideal bernilai 100 di 2018), dari semula 73,75 di 2017 menjadi 74,67 di 2018. Angka kenaikan/*shortfall* tersebut relatif lebih tinggi daripada *shortfall* indeks Provinsi Jambi sebesar 0,66. IPM Kota Sungai Penuh apabila dibandingkan dengan angka yang diperoleh di daerah sekitarnya, Kota Jambi memperlihatkan angka yang relatif lebih tinggi, masih sama seperti kondisi di tahun 2016 dan 2017 (*Lampiran 2*).

Tabel 6.3
Reduksi *Shartfall* IPM Kota Sungai Penuh

No	Wilayah	IPM			Reduksi <i>Shartfall</i>	
		2016	2017	2018	2016-2017	2017-2018
1.	PROVINSI JAMBI	69.62	69.99	70.65	1,22	0,66
2.	KERINCI	69.68	70.03	70.59	1,15	0,56
3.	MERANGIN	67.86	68.30	68.81	1,37	0,51
4.	SAROLANGUN	68.73	69.03	69.41	0,96	0,38
5.	BATANGHARI	68.70	68.92	69.33	0,70	0,41
6.	MUARO JAMBI	67.55	67.86	68.34	0,95	0,48
7.	TANJUNG JABUNG TIMUR	61.88	62.61	63.32	1,91	0,72
8.	TANJUNG JABUNG BARAT	65.91	66.15	67.13	0,70	0,99
9.	TEBO	68.05	68.16	68.67	0,34	0,51
10.	BUNGO	68.77	69.04	69.42	0,86	0,38
11.	KOTA JAMBI	76.14	76.74	77.41	2,52	0,67
12.	KOTA SUNGAI PENUH	73.35	73.75	74.67	1,50	0,93

BAB VII

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN

Kesenjangan nilai IPM antar kabupaten/kota setidaknya mencerminkan adanya perbedaan pada pemanfaatan hasil pembangunan ekonomi dan sosial selama ini yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Kota Sungai Penuh. Pembangunan manusia merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai IPM di suatu daerah diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di wilayah tersebut. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Diperlukan kemauan politik yang cukup kuat dari pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Mungkin tidak ada satupun negara di dunia ini yang akan bisa terlepas sepenuhnya dari persoalan kemiskinan. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia. Sejak memproklamkan kemerdekaannya hingga saat ini persoalan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Padahal sepanjang berdirinya republik ini berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Satu hal yang paling mungkin dilakukan tentunya adalah bagaimana menciptakan agar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Namun untuk mencapainya dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain di Asia. Dengan demikian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan non Makanan (GKNM)

$$GK = GKM + GKNM$$

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, dll). Ke 52 komoditi tersebut merupakan komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

7.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh, mengalami peningkatan. Hal itu membuat angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh, mengalami penurunan secara drastis. Pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh yaitu 3,13 persen, mengalami penurunan pada 2017 yaitu 2,78 persen. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2018, yaitu menjadi 2,76 persen. Data ini juga menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kemiskinan terendah dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Tabel 7.1
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO)		
	2016	2017	2018
Provinsi Jambi	8.41	8.19	7.92
Kerinci	7.48	7.45	7.07
Merangin	9.95	9.43	8.88
Sarolangun	9.33	8.87	8.73
Batanghari	10.79	10.33	10.23
Muaro Jambi	4.30	4.37	4.05
Tanjung Jabung Timur	12.76	12.58	12.38
Tanjung Jabung Barat	11.81	11.32	11.10
Tebo	6.87	6.79	6.58
Bungo	5.99	5.82	5.78
Kota Jambi	8.87	8.84	8.49
Kota Sungai Penuh	3.13	2.78	2.76

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

7.2 Perubahan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Tabel 7.2
Garis Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

Wilayah	Garis Kemiskinan		
	2016	2017	2018
Provinsi Jambi	371875	389596	426251
Kerinci	285406	309941	333978
Merangin	325181	347523	374250
Sarolangun	386460	393344	403411
Batanghari	341320	365365	394438
Muaro Jambi	255918	295983	353583
Tanjung Jabung Timur	322389	338963	361574
Tanjung Jabung Barat	303479	314436	348495
Tebo	338160	363698	379390
Bungo	292573	310428	366226
Kota Jambi	397088	413722	466854
Kota Sungai Penuh	317556	334856	351391

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

Pada Tabel 7.2 garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 yaitu 334856 mengalami peningkatan di tahun 2018 yaitu 351391. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan

Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

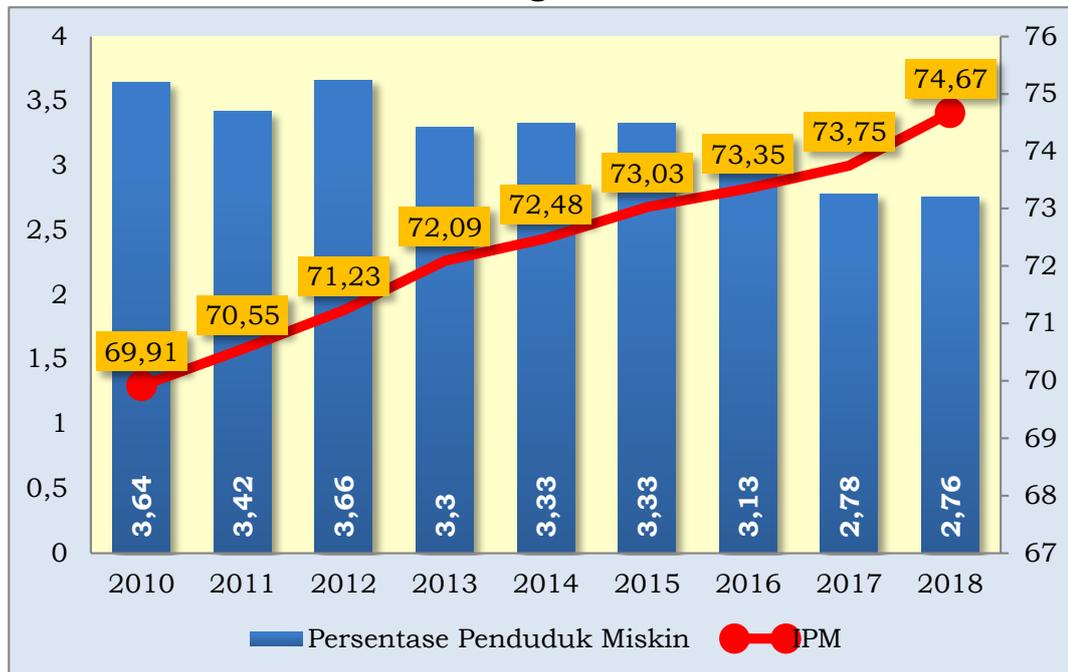
Tabel 7.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Provinsi Jambi Menurut Daerah
Tahun 2016-2018

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kerinci	0.92	1.56	0.72	0.20	0.51	0.12
Merangin	1.77	1.69	1.86	0.49	0.52	0.57
Sarolangun	1.37	2.20	1.49	0.29	0.69	0.39
Batanghari	1.29	1.86	1.24	0.23	0.51	0.25
Muaro Jambi	0.49	0.45	0.68	0.08	0.07	0.21
Tanjung Jabung Timur	2	2.98	2.19	0.56	1.05	0.56
Tanjung Jabung Barat	1.61	2.35	1.70	0.36	0.67	0.42
Tebo	0.96	0.87	0.95	0.23	0.19	0.26
Bungo	0.97	1.19	0.62	0.22	0.29	0.13
Kota Jambi	1.59	1.13	1.26	0.43	0.27	0.28
Kota Sungai Penuh	0.26	0.23	0.26	0.04	0.03	0.03

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

Pada periode 2016-2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,23 pada tahun 2017 menjadi 0,26 pada tahun 2018. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan tidak mengalami perubahan yaitu 0,03 di 2017 dan 0,03 di 2018. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Grafik 7.3
Hubungan Antara IPM dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Sungai Penuh



Grafik 7.3 mengilustrasikan hubungan antara IPM dan insiden kemiskinan di Kota Sungai Penuh. Tampak di sini bahwa hubungan antara kedua indikator ini bersifat negatif dan dengan r sebesar $-0,889$. Hubungan ini berarti bahwa semakin tinggi nilai IPM semakin rendah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.3
Pearson Correlation IPM dan Persentase Penduduk Miskin
di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

		IPM	Persentase_Penduduk_Miskin
IPM	Pearson Correlation	1	-,889
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	9	9
Persentase_Penduduk_Miskin	Pearson Correlation	-,889	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	9	9

BAB VIII

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

8.1 Konsep Ketenagakerjaan

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS telah melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976, namun baru mulai tahun 1986 dilakukan secara berkala. Sampai saat ini, Sakernas telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam periode pencacahan, metodologi maupun cakupan sampel wilayah rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan tahun 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 dilakukan secara tahunan, yaitu pada setiap Bulan Agustus kecuali pada tahun 1995, Sakernas tidak dilakukan karena data ketenagakerjaan dapat diperoleh dari Supas 1995.

Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, selain secara tahunan Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga Tahun 2007 Sakernas dilaksanakan secara semesteran yaitu semester I pada Bulan Februari dan semester II pada Bulan Agustus, akan tetapi pelaksanaan Sakernas semester II

pada Tahun 2005 teraksa tertunda pelaksanaannya menjadi Bulan November 2005 karena pada Bulan Agustus-Oktober 2005 BPS melaksanakan kegiatan survei *urgent* berskala nasional lainnya.

Dalam mengumpulkan dan menyajikan data ketenagakerjaan, BPS selalu menggunakan konsep dan definisi yang direkomendasikan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini dimaksudkan agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi spesifik ketenagakerjaan Indonesia. Menurut konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan sebagai berikut:

Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian seperti yang ditunjukkan pada diagram ketenagakerjaan di atas. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut dikenal sebagai *penganggur terbuka (open unemployment)*.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hor criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan bekerja. Berdasarkan hal-hal dimaksud, maka di dalam pelaksanaan Sakernas digunakan konsep/definisi "*bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu*" untuk mengkategorikan seseorang bekerja.

8.2 Perkembangan Variabel-Variabel Ketenagakerjaan

8.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pertambahan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja), dengan demikian jumlah penduduk yang memasuki

angkatan kerja juga akan meningkat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi TPAK.

Tabel 8.2.1
Penduduk Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Kegiatan Utama (<i>Main Activity</i>)	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			
- Bekerja/ <i>Working</i>	226043	19212	45255
- Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1541	1064	2605
Bukan Angkatan Kerja/ <i>Economically Inactive</i>			
- Sekolah/ <i>Attending School</i>	2499	2952	5451
- Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	502	9938	10440
- Lainnya/ <i>Others</i>	2341	1205	3546
Jumlah/Total	32926	34371	67297
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,78	58,99	71,69
Tingkat Pengangguran	5,59	5,25	7,36

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

TPAK penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2018 sebesar 71,69. TPAK penduduk laki-laki sebesar 83,78 lebih

besar dibandingkan TPAK penduduk perempuan yaitu sebesar 58,99. Tingkat pengangguran secara keseluruhan 7,36, yaitu pengangguran laki-laki sebesar 5,59 dan tingkat pengangguran perempuan sebesar 5,25. Jika dicermati, TPAK perempuan lebih rendah dibanding TPAK laki-laki, begitu juga dengan tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 8.2.1
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Pendidikan Terakhir	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan sampai dengan SD	12370	241	12611
SLTP/Sederajat	8622	92	8714
SMA	11195	953	12148
SMK	3997	0	3997
Diploma I/II/III	2731	132	2863
Universitas	6340	1187	7527

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

TPAK menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan berbeda-beda. Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan Tidak/Belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan sampai dengan SD lebih menonjol atau lebih tinggi yang sudah bekerja dibandingkan tamatan SLTP, SMA, SMK, Diploma I/II/III dan Universitas. Ini lebih dikarenakan:

1. Gengsi

Lulusan universitas cenderung terkendala beban gengsi. Mereka merasa malu jika melakukan pekerjaan kasar atau di luar bidang jurusannya. Mereka lebih berminat untuk bekerja dengan posisi yang lebih

bergengsi. Padahal semua pekerjaan itu mulia dan semuanya adalah proses.

2. Mental Belajar

Dari segi mental belajar, kebanyakan lulusan universitas masih kalah dengan lulusan SD. Lulusan SD selalu terbuka untuk belajar apa saja. Hasilnya, lulusan SD punya antusias belajar yang lebih besar. Sedangkan lulusan universitas kebanyakan masih terganjal oleh bidang jurusannya, sehingga mereka kurang berminat untuk belajar di luar bidangnya. Padahal seharusnya lulusan universitas harus terbuka untuk belajar apa pun. Sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi, lulusan yang baik bukanlah lulusan yang siap kerja dan siap pakai. Melainkan lulusan yang siap latih dan belajar lagi.

3. Skill

Satu lagi alasan utama kenapa lulusan universitas menganggur yaitu karena minimnya skill. Di era internet seperti sekarang, siapa pun yang ingin bersaing di dunia kerja harus memiliki skill yang mumpuni. Paling tidak, lulusan universitas sekarang harus menguasai 5 skill penting: selling skill, problem solving skill, digital skill, public speaking dan writing skill.

Lulusan SD memang tidak menguasai kelima skill tersebut. Namun ruang lingkup pekerjaan mereka tidak menuntut para lulusan SD untuk memiliki keahlian tersebut. Hal sebaliknya terjadi di lingkungan sarjana. Sayangnya para lulusan universitas justru lebih mengedepankan ijazah di jurusan tertentu sebagai pemakluman akan ketiadaan skill tersebut.

4. Lemah dalam cara berpikir analitis

Kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan memandang permasalahan kompleks dengan runut dan sederhana. Dari sana dibuatlah rumusan masalah dan

solusinya. Sayangnya, kemampuan berpikir analitis ini sangat jarang dimiliki lulusan universitas.

Di daerah perkotaan baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sifat pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan yang lebih fleksibel karena lebih banyak usaha yang bersifat informal.

8.2.2 Pengangguran

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sungai Penuh pada tahun 2018 sebesar 2.605. Dimana pendidikan angkatan kerja tidak sekolah atau tingkat SD sebesar 241, SLTP sederajat sebanyak 92, SMA sebanyak 953, SMK 0, Diploma I/II/III sebanyak 132, dan Universitas sebanyak 1187.

Tabel 8.2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sungai Penuh
Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Pengangguran Terbuka
1. Tidak/Belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan sampai dengan SD	241
2. SLTP/Sederajat	92
3. SMA	953
4. SMK	0
5. Diploma I/II/III	132
6. Universitas	1187
TOTAL	2605
Tingkat Pengangguran	7,36

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

Pada tahun 2018 tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh sebesar 7,36. mengalami peningkatan sebanyak 14,65 dibandingkan kondisi setahun sebelumnya sebesar 23,23. Data tersebut mengindikasikan bahwa dari

setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA keatas di Sumatera Selatan pada Tahun 2007, sebanyak 37 sampai 38 orang diantaranya sedang menganggur. Dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah.

8.2.3 Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja

Di Sungai Penuh sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan masih dominan, di mana 12417 dari pekerja di Sungai Penuh ditampung oleh sektor perdagangan. Sementara sektor lainnya yang banyak digeluti oleh Penduduk Kota Sungai Penuh adalah sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan dan Ansuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Kemasyarakatan).

Tabel 8.2.3
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	5559	3883	9442
2. Konstruksi	3410	0	3410
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	6577	5840	12417
4. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1892	1935	3827

5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan dan Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Kemasyarakatan	8605	7554	16159
Jumlah	26043	19212	45255

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

8.2.4 Status Pekerjaan

Menilik status pekerjaan, sangat sedikit penduduk yang bekerja sebagai pengusaha dengan buruh tetap (1918 orang). Ini menunjukkan skala usaha penduduk yang umumnya masih rendah. Penduduk yang berstatus berusaha umumnya berusaha sendiri (12818 orang) atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/art (7622 orang). Status pekerjaan penting yang paling besar lainnya adalah sebagai pekerja tidak dibayar (3538 orang).

Status pekerjaan pekerja laki-laki dan perempuan terlihat mempunyai pola yang berbeda. Pekerja laki-laki cenderung berstatus Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sementara pekerja perempuan berstatus Buruh/ Karyawan/Pegawai. Pola seperti ini merupakan cerminan dari kondisi sosial di mana laki-laki sebagai pemimpin keluarga juga merupakan pemimpin usaha sedangkan perempuan menjadi membantu suami.

Tabel 8.2.4
Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	7403	5415	12818
2. Berusaha sendiri dibantu Buruh tidak tetap/Buruh dibayar	4789	2833	7622
3. Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	1450	468	1918
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	6397	6160	12557
5. Pekerja Bebas di Pertanian	1129	1424	2553
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	4097	152	4249
7. Pekerja Keluarga/Tak dibayar	778	2760	3538
Jumlah	%	100,00	100,00
	N	26043	19212
		45255	

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2019

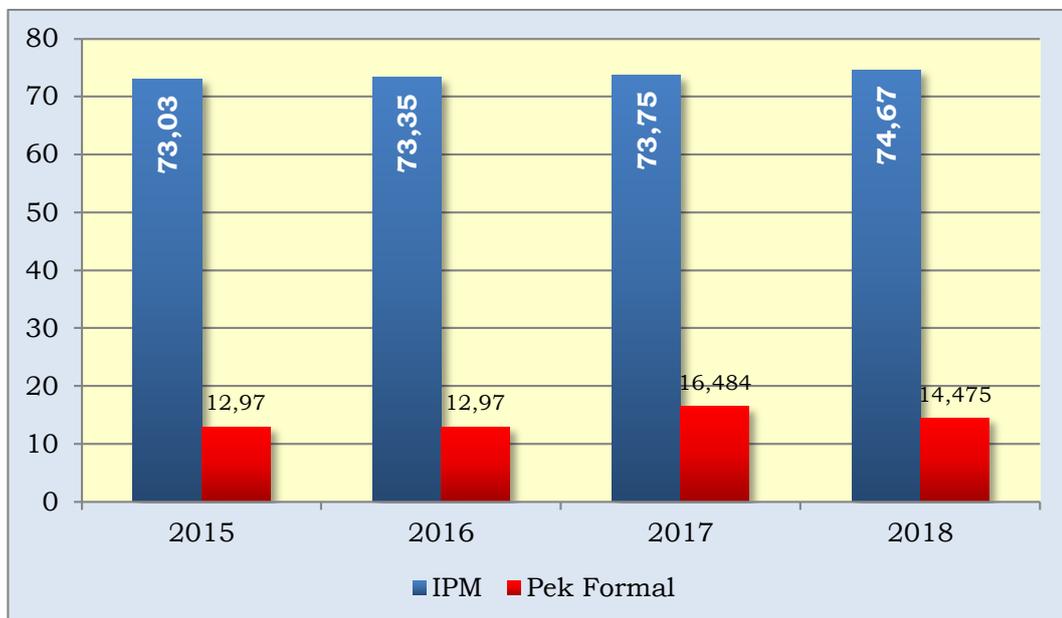
8.3 Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja

Baik di dalam kerangka teoritis maupun kerangka empiris telah banyak dibuktikan bahwa faktor tenaga kerja memiliki bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Bahkan faktor tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output (produksi) tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah (produktivitas).

Dalam suatu sistem ekonomi yang sedang berkembang, bahkan yang sudah maju sekalipun, dualisme ekonomi merupakan masalah tersendiri. Di satu sisi sektor industri yang identik sebagai sektor yang padat modal memerlukan relatif sedikit tenaga kerja dengan kualitas yang lebih tinggi. Di sisi lain sektor pertanian yang juga dikenal sebagai sektor tradisional lebih bersifat padat karya. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada hakekatnya pembangunan manusia sebagai faktor tenaga kerja dalam suatu sistem ekonomi menjadi satu syarat mutlak bagi setiap sektor apapun.

Pemahaman atas keterkaitan antara pembangunan manusia dengan indikator-indikator sosial dan ekonomi lainnya adalah mutlak sangat penting. Meningkatnya pembangunan manusia akan memberikan dampak positif terhadap kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil. SDM yang produktif juga berarti angkatan kerja yang handal dan mampu memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan nilai tambah output dan produksi.

Grafik 8.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Pekerja Sektor Formal Tahun 2018



Grafik 8.3 memperlihatkan hubungan antara pembangunan manusia dengan persentase pekerja di sektor formal-sebagai proksi tenaga kerja produktif, dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Seperti yang diharapkan, hubungan antara IPM dan persentase pekerja di sektor formal adalah positif dan cukup kuat dengan *Pearson Correlation Coefficient* r sebesar 0,461 (lihat tabel 8.3). Hubungan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai IPM di Kota Sungai Penuh, akan semakin tinggi pula persentase pekerja sektor formal di kota tersebut. Sektor formal disini didefinisikan dengan pendekatan status bekerja sebagai

'berusaha dengan buruh tetap/buruh dibayar' dan 'buruh/karyawan /pegawai dengan majikan tetap'.

Tabel 8.3
Pearson Correlation IPM dan Persentase Pekerja
Sektor Formal di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

		IPM	Pek_Formal
IPM	Pearson Correlation	1	,461
	Sig. (2-tailed)		,539
	N	9	4
Pek_Formal	Pearson Correlation	,461	1
	Sig. (2-tailed)	,539	
	N	4	4

Tingkat produktivitas pekerja yang relatif tinggi diharapkan akan sangat menunjang peningkatan produksi barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk produksi komoditi pangan. Peningkatan produksi pangan ini pada gilirannya akan menjamin stok atau persediaan pangan Kota Sungai Penuh, bahkan pangan nasional, sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketahanan pangan yang menyeluruh dan terintegrasi. Lebih penting lagi, meningkatnya produktivitas pekerja secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dikarenakan membaiknya tingkat pendapatan. Dengan kata lain, membaiknya produktivitas pekerja bukan hanya berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi barang, akan tetapi secara langsung berdampak pula pada pengurangan tingkat kemiskinan suatu daerah.

BAB 8

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KETAHANAN PANGAN

8.1. Konsep Dasar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan antara ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Sistem ini menjamin adanya ketersediaan pangan dengan distribusi yang merata dan harga terjangkau, dan sesuai dengan besarnya kebutuhan dan pola konsumsi penduduk. Ketiga komponen utama ini ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjamin suatu kondisi ketahanan pangan yang mantap.

Ketersediaan pangan sangat tergantung pada kemampuan produksi berbagai jenis makanan pokok di dalam negeri, dan pada perdagangan bahan makanan antar negara (ekspor dan impor), yang pada gilirannya mempengaruhi cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saat sekarang maupun masa mendatang di seluruh negara. Ketika ketersediaan pangan terjamin, faktor krusial berikutnya adalah memastikan suatu distribusi pangan yang secara proporsional merata di seluruh wilayah negara dengan penetapan harga dasar eceran yang terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Sebagaimana disebutkan di atas, ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi oleh masyarakat untuk menopang aktivitasnya sepanjang waktu.

Secara nasional, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan tertuang secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, di mana secara umum mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan nasional. Implementasi dari UU tersebut tertuang dalam:

- (i) PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan untuk menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; dan
- (ii) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, serta peranserta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan.
- (iii) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur tentang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah; penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat; kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan; pengawasan; sistem informasi pangan dan gizi; dan peran serta masyarakat.

Banyak indikator yang digunakan untuk melihat ketahanan pangan, namun beberapa di antaranya sulit diukur. Indikator yang baik mempunyai ciri: cukup sederhana untuk pengumpulan dan penafsirannya, objektif, dapat diukur dengan angka, dan responsive terhadap perubahan-perubahan akibat adanya program. Seharusnya indikator ketahanan pangan dapat merepresentasikan jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi sesuai norma gizi.

Salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan suatu wilayah adalah ketersediaan pangan yaitu tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Namun, indikator ini masih bersifat makro, karena bisa saja pangan tersedia, tapi tidak dapat diakses oleh masyarakat. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum cukup. Untuk itu diperlukan pemahaman kinerja konsumsi pangan. Indikator yang dapat digunakan adalah tingkat partisipasi dan tingkat konsumsi pangan, keduanya menunjukkan tingkat aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan (DKP, 2003).

Walaupun pangan tersedia pada suatu wilayah, jika tidak dapat diakses masyarakat maka kinerjanya rendah. Aksesibilitas tersebut menggambarkan aspek pamarataan dan keterjangkauan. Karena menurut PP No.17/2015, pemerataan mengandung makna adanya distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga, sedangkan keterjangkauan adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. Karena itu ukuran ketahanan pangan yang akan dikemukakan di sini meliputi pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi dan protein.

8.2. Pangsa Pengeluaran Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat di pakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton dan Muellbauer, 1980).

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi kelompok makanan masih relatif besar (mendekati 50%) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju

pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita. Dengan demikian, proporsi pengeluaran untuk kelompok komoditi makanan dan non makanan adalah salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Secara umum proporsi pengeluaran makanan penduduk di Kota Sungai Penuh cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada Tabel 8.1 di bawah ini, terlihat pada tahun 1996 pangsa pangan mencapai 62,95 persen, meningkat menjadi 70,36 persen pada tahun 1999 sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1998. Pangsa pengeluaran pangan kembali normal menjadi 63,75 persen pada tahun 2002 dan terus menurun menjadi 9,62 persen pada tahun 2005 dan 53,83 persen pada tahun 2007. Penurunan ini tentu saja di samping merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan penduduk sebagaimana disebutkan di atas, juga mengisyaratkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan di tingkat rumahtangga di Sumatera Selatan.

Tabel 8.1. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Sumatera Selatan 1996 – 2007

Daerah	1996	1999	2002	2005	2007
Perkotaan	53,76	63,96	55,81	50,03	49,88
Pedesaan	70,23	74,28	71,64	68,32	57,33
<i>Indonesia</i>	<i>55,27</i>	<i>62,94</i>	<i>58,47</i>	<i>51,37</i>	<i>49,24</i>

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas modul konsumsi, 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2007.

Dibandingkan dengan kondisi nasional, pangsa pangan penduduk Sumatera Selatan lebih tinggi. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat Sumsel serta derajat ketahanan pangan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Tabel 6.1. juga memperlihatkan bahwa dibandingkan daerah pedesaan, daerah perkotaan mempunyai pangsa pangan yang lebih rendah yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

8.3. Konsumsi Energi dan Protein

Selain pangsa pangan, ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat dilihat dari kandungan gizi dalam konsumsi pangan rumahtangga. Berdasarkan norma gizi, secara garis besar konsumsi makanan yang menghasilkan tubuh yang sehat perlu mengandung unsur pangan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin/mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Keseimbangan dalam mengkonsumsi berbagai jenis pangan akan mencerminkan kualitas konsumsi pangan rumahtangga. Menurut Widayakarya Pangan dan Gizi VII tahun 2004, angka kecukupan gizi di tingkat individu adalah untuk konsumsi kalori sebesar 2000 kkal/hari dan konsumsi protein sebesar 53 gram/hari.

Tabel 8.2 memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan rata-rata konsumsi energi dan protein dari penduduk Indonesia selama 6 tahun terakhir ini. Secara umum, rata-rata kandungan energi dan protein yang dikonsumsi oleh

penduduk Sumatera Selatan cenderung

meningkat pada periode 1999 – 2007. Peningkatan ini merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga derajat ketahanan pangan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan di atas, sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat maka kandungan gizi dari konsumsi pangan juga akan meningkat. Dibandingkan dengan standar kecukupan gizi sesuai WNPG VIII, konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2007 telah melebihi standar kecukupan energi dan protein.

Tabel 8.2 . Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per Hari Per Kapita, Sumatera Selatan

1996 – 2007

Konsumsi	1996	1999	2002	2005	2007
A. ENERGI (kilo kalori) Perkotaan					
Pedesaan	2.008,	1.828,	1.864,	1.905,	2.004,
Sumatera Selatan	5	7	5	8	8
<i>Indonesia</i>	2.173,	1.918,	2.002,	2.035,	2.091,
	8	6	8	0	9
B. PROTEIN (gram)	2.123,	1.891,	1.953,	1.990,	2.058,
Perkotaan Pedesaan	6	1	9	3	2
Sumatera Selatan					

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas modul konsumsi, 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2007.

Konsumsi energi jauh lebih tinggi dikonsumsi oleh penduduk pedesaan dari

penduduk perkotaan. Sedangkan protein cenderung sedikit lebih banyak dikonsumsi oleh penduduk perkotaan dari pada mereka yang tinggal di pedesaan. Namun demikian, pada tahun 2007 baik di perkotaan maupun perdesaan konsumsi energi dan protein penduduk telah melebihi standar kecukupan energi dan protein nasional.

Maxwell dan Frankenberger (1992) menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk mengklasifikasikan ketahanan pangan rumahtangga menjadi empat kategori yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Batasan yang digunakan adalah 80 persen dari standar kecukupan energi dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan 60 persen dari total pengeluaran rumahtangga. Rumahtangga yang mempunyai pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi di atas 80 persen dikategorikan rumahtangga **tahan pangan**, jika pangsa pangan di atas 60 persen dan konsumsi energi di atas 80 persen dikategorikan **rentan pangan**, jika pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan **kurang pangan** serta rumahtangga yang mempunyai pangsa pangan di atas 60 persen dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan **rawan pangan**.

Tabel 8.3. Ketahanan Pangan Tingkat Rumahtangga di Sumatera Selatan 2007: Pangsa Pangan dan Kecukupan Energi

Kecukupan	Pangsa Pangan	
	< 60 Persen	>= 60 Persen
80 Persen	Tahan Pangan: N = 538.123 % = (24,27)	Rentan Pangan: N = 691.313 % = (44,15)
80 Persen	Kurang Pangan: N = 154.629 % = (0,88)	Rawan Pangan: N = 181.594 % = (11,60)

Sumber: BPS, diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Rumahtangga tahan pangan memiliki kemampuan untuk mencukupi konsumsi energi selain karena mempunyai akses yang tinggi secara ekonomi juga memiliki akses secara fisik. Rumahtangga yang rentan pangan mempunyai kondisi di mana terpenuhi standar kecukupan energi dalam rumahtangga namun

pendapatan rumahtangga relatif rendah sehingga berpotensi menjadi kekurangan pangan (akses ekonomi yang rendah). Sedangkan dengan kondisi kurang pangan mempunyai akses secara ekonomi tetapi mempunyai akses yang rendah

secara fisik terhadap pangan. Rumahtangga rawan pangan mempunyai akses yang rendah terhadap pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka rumahtangga di Sumatera Selatan pada tahun 2007 terkategori sebagai berikut: 34,37 persen adalah rumahtangga tahan pangan, 44,15 persen rumahtangga rentan pangan, 9,88 persen rumahtangga kurang pangan dan 11,60 persen rumahtangga rawan pangan.

8.4. Pembangunan Manusia dan Ketahanan Pangan

Pembangunan manusia sering diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas kesempatan dan pilihan-pilihan bagi manusia untuk mampu hidup lebih baik. Pilihan-pilihan ini meliputi terjaminnya sumber pendapatan yang ajeg, kondisi kesehatan yang prima, pendidikan yang memadai, lingkungan fisik yang kondusif, dan adanya kebebasan untuk bertindak. Sedangkan

Keterkaitan antara pembangunan manusia dan ketahanan pangan memang tidak dapat diartikan sebagai suatu hubungan sebab-akibat yang bersifat searah dan langsung. Hubungan keduanya cenderung kompleks dan berdimensi banyak. Diagram 1 mencoba untuk menggambarkan suatu konsep hipotesis tentang sistem ketahanan pangan dikaitkan dengan pembangunan manusia (SDM), pencapaian kualitas hidup dan kecukupan gizi. Konsep ini menjelaskan bahwa pengembangan SDM yang diindikasikan oleh peningkatan pendidikan, dan membaiknya kondisi kesehatan dan gizi dari penduduk di suatu negara akan diikuti dengan perbaikan tingkat produktivitas angkatan kerja dalam menghasilkan output atau produksi. Pemanfaatan dari meningkatnya produktivitas ini dapat ditinjau baik dari sisi makro nasional maupun tingkat mikro individual rumahtangga dan masyarakat.

Dari pendekatan makro nasional, membaiknya tingkat produktivitas angkatan kerja mempengaruhi peningkatan produksi pangan dalam negeri dan perdagangan ekspor-impor komoditi pangan, melalui peranan para pelaku ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Pada gilirannya, peningkatan produktivitas untuk menghasilkan produksi dan perdagangan pangan dapat

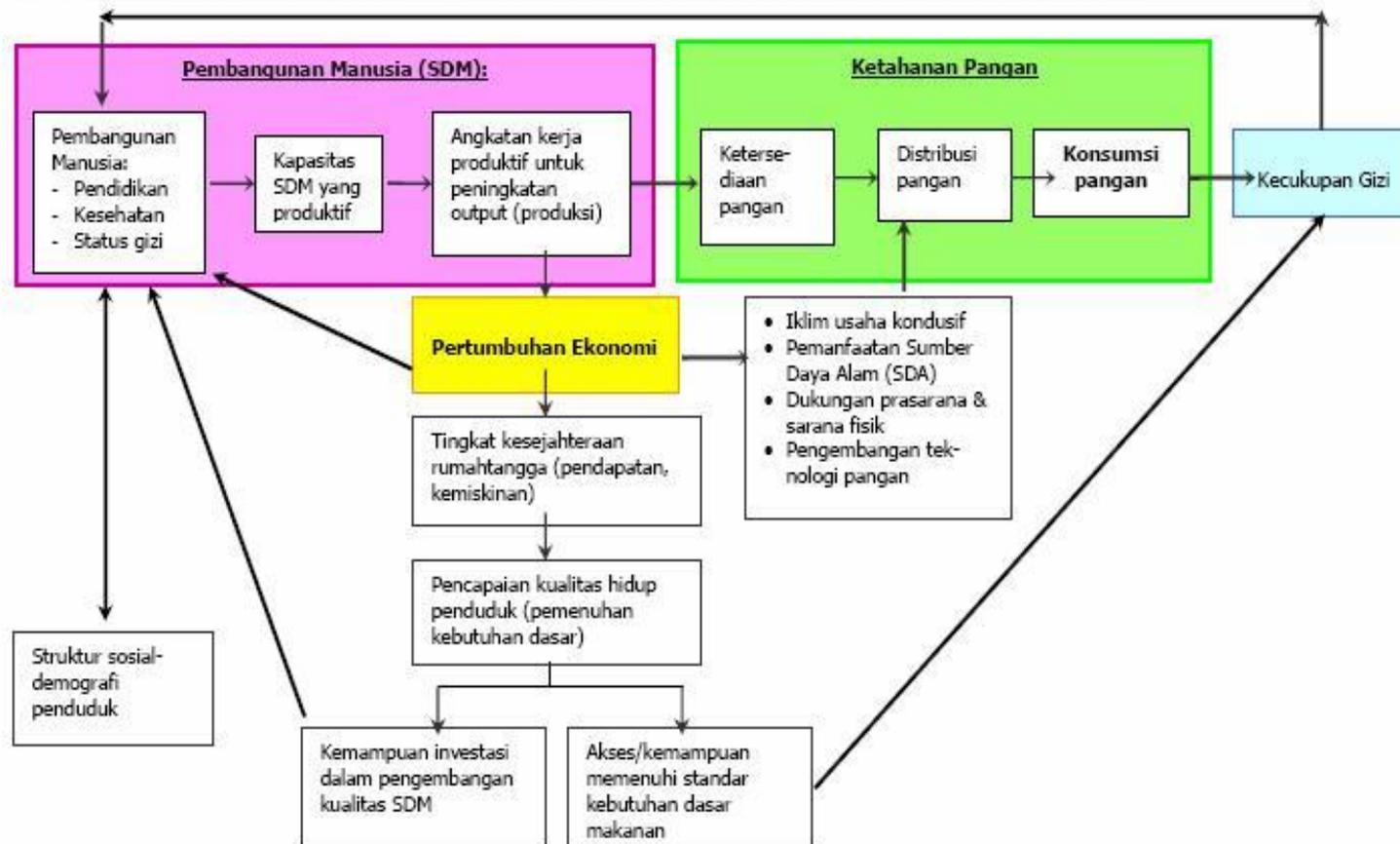
menjamin ketersediaan pangan nasional. Kapasitas SDM yang produktif juga merupakan faktor kunci dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk memperbaiki distribusi pangan yang merata untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dari seluruh penduduk.

Mekanisme pengembangan SDM dalam kaitannya dengan membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan secara langsung memberikan kontribusi pada tercapainya suatu kecukupan gizi bagi seluruh masyarakat di suatu negara, yang pada gilirannya akan menjamin pengembangan SDM yang produktif.

Dari sisi mikro individual rumahtangga dan masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas angkatan kerja merangsang peningkatan pendapatan penduduk melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan yang membaik merupakan faktor fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan rumahtangga, yang sekaligus untuk menurunkan insiden kemiskinan. Kondisi ini pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian kualitas hidup. Kualitas atau standar hidup yang layak diartikan sebagai kemampuan suatu rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik untuk kebutuhan dasar makanan yang bergizi, maupun untuk investasi pendidikan dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga khususnya generasi berikutnya. Kemampuan memenuhi standar kebutuhan dasar makanan juga berarti terjaminnya daya beli dari individu-individu rumahtangga dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengamankan persediaan dan konsumsi pangan secara ajek. Sedangkan kemampuan individu-individu rumahtangga untuk investasi pendidikan dan kesehatan akan selanjutnya mendasari pengembangan SDM yang berkualitas.

Gambar 8.1

Diagram 1. Peranan Pembangunan Manusia dalam Kerangka Pemantapan Ketahanan Pangan



Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan 2007

66

Kesenjangan nilai IPM antar kabupaten/kota setidaknya mencerminkan adanya perbedaan pada pemanfaatan hasil pembangunan ekonomi dan sosial selama ini yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai IPM di suatu wilayah diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di wilayah tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak semua dari tiga dimensi yang digunakan senantiasa dapat menggambarkan kemajuan pembangunan manusia secara bersamaan. Sementara di beberapa wilayah kemajuan di bidang ekonomi seiring dengan kemajuan di bidang sosial, di wilayah-wilayah lainnya kemajuan pembangunan sosial justru memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian pembangunan manusia dari pada kemajuan di bidang ekonomi. Ketika sistem sentralisasi dianut, kebijakan pembangunan regional pada prinsipnya adalah bagian yang melekat dari kebijakan nasional baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Oleh karena itu, peranan kebijakan pembangunan regional saat itu dalam memajukan pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya tidak berbeda antar daerah. Perbedaan yang mungkin terjadi antar wilayah adalah adanya variasi pada akses dan kesempatan terhadap lapangan kerja dan sumber-sumber penghasilan bagi penduduk di daerah-daerah yang berbeda. Namun begitu, kemajuan pembangunan manusia antar wilayah akan mempunyai pola yang berbeda di era otonomi daerah saat ini, mengingat kapasitas sumber daya ekonomi antar daerah beragam untuk investasi di bidang pembangunan manusia, khususnya sektor publik kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, sanitasi dan infrastruktur sosial lainnya.

Selanjutnya, seperti yang digambarkan pada Gambar 8.1, membaiknya tingkat

kesejahteraan rumahtangga akan mendukung tercapainya kualitas/standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak berarti adanya kemampuan finansial bagi rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota rumahtangga, khususnya anak-anak. Kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anggota rumahtangga juga berarti investasi dalam pengembangan kualitas SDM di masa mendatang. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, jika terjadi secara merata di antara sebagian besar rumahtangga di suatu negara atau

wilayah, akan menjamin daya beli yang ajeg dari individu-individu rumahtangga dan masyarakat secara keseluruhan, yang diperlukan untuk mengamankan konsumsi pangan yang stabil. Sebagai salah satu dari tiga komponen sistem ketahanan pangan, adanya kemampuan atau daya beli masyarakat untuk belanja konsumsi kebutuhan pangan merupakan simpul krusial untuk menjamin pemanfaatan stok pangan yang telah dibangun, dan pada gilirannya kondisi ini akan menciptakan suatu sistem ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 8.4. menyajikan hubungan antara beberapa indikator ketahanan pangan dengan IPM Sumatera Selatan. Secara umum terlihat bahwa ada keterkaitan antara IPM dengan ketahanan pangan rumahtangga di Sumatera Selatan, di mana kenaikan/penurunan IPM sejalan dengan naik/turunnya indikator ketahanan pangan tersebut pada periode 1996 – 2007.

Tabel 8.4. Beberapa Indikator Ketahanan Pangan dan IPM Sumatera Selatan 1996 - 2007

Indikator	1996	1999	2002	2005	2007
Dengan Pangan	69.05	70.26	62.75	50.62	52.82
Konsumsi Energi	0.102	1.801	1.052	1.000	0.058
Konsumsi Protein	56.06	47.14	50.00	54.51	58.01
IPM	68.00	62.00	66.00	70.00	71.40

Sumber: BPS

Agar hubungan antara IPM dan ketahanan pangan nampak lebih jelas, masing-masing indikator ketahanan pangan di atas dihubungkan dengan IPM

dalam sebuah grafik yang terpisah yaitu pada Gambar 8.2., Gambar 8.3. dan Gambar 8.4. di bawah ini.

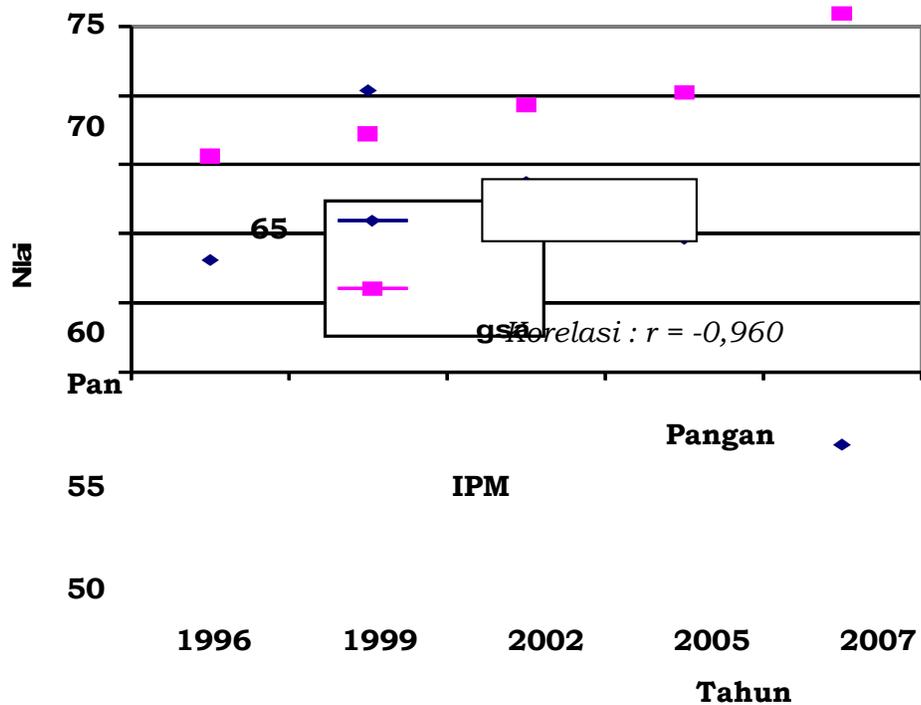
Hubungan antara IPM dengan pangsa pangan berbanding terbalik, di mana jika pangsa pangan naik maka IPM akan turun, sebaliknya jika pangsa pangan turun maka IPM naik. Hubungan antara IPM dan pangsa pangan tersebut sangat kuat di mana korelasi antara keduanya sebesar $-0,960$.

Hubungan antara IPM dengan konsumsi energi maupun konsumsi protein berbanding

lurus, di mana jika konsumsi energi dan protein naik maka IPM akan naik, demikian juga jika

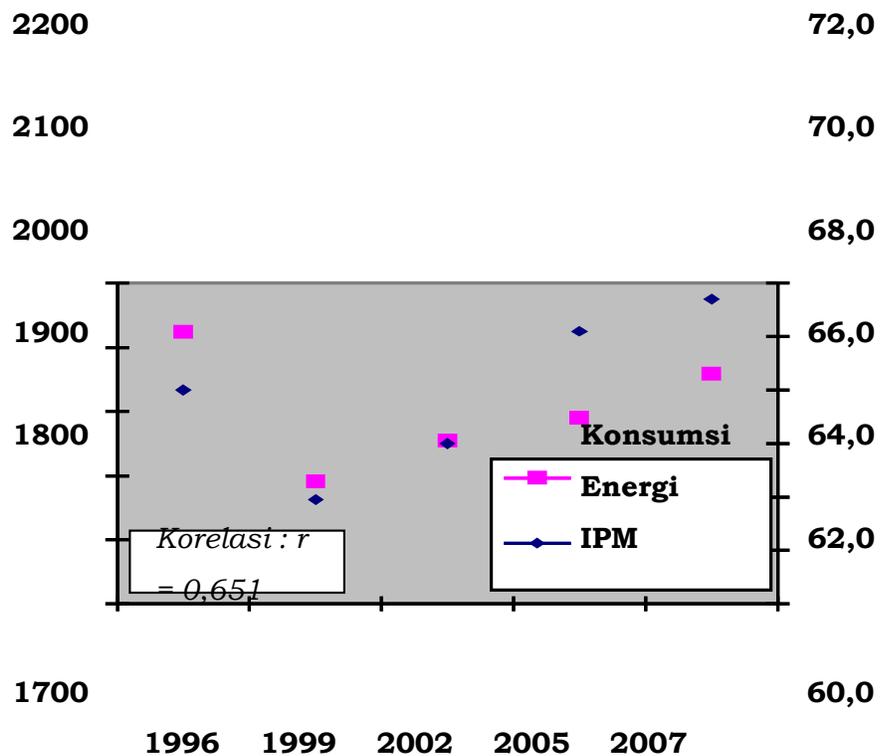
konsumsi energi dan protein turun maka IPM juga turun. Hubungan antara IPM dan konsumsi energi dan protein tersebut juga sangat kuat di mana korelasi keduanya dengan IPM masing-masing sebesar 0,651 dan 0,927.

Gambar 8.2. Hubungan antara IPM dan Pangsa Pangan, Sumatera Selatan

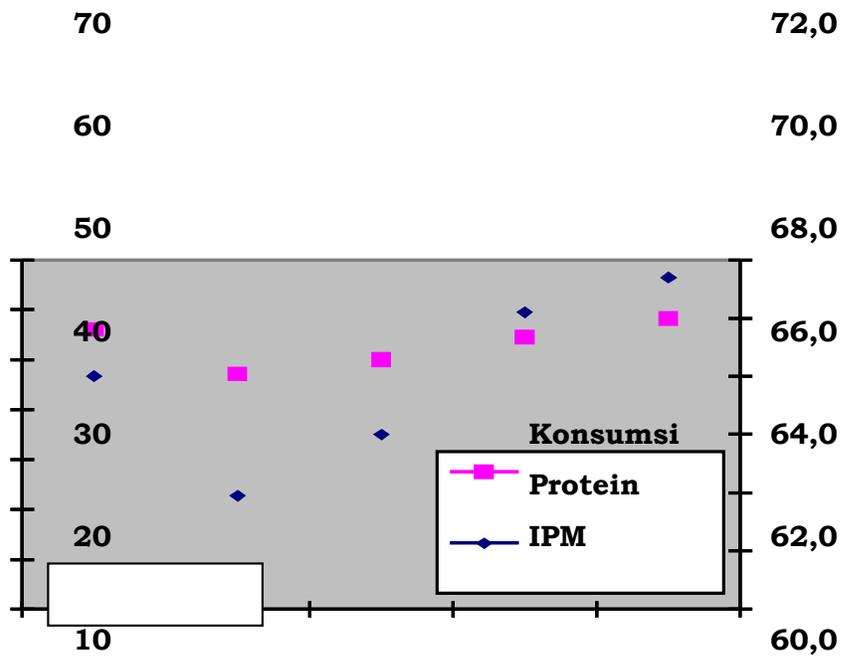


Gambar 8.3. Hubungan antara IPM dan Konsumsi, Sumatera

Selatan



Gambar 8.4. Hubungan antara IPM dan Konsumsi Protein, Sumatera Selatan



Korelasi : r
 = 0,927
 0

1996 1999 2002 2005 2007

Dengan demikian dapat disimpulkan antara ketahanan pangan dan IPM terdapat hubungan yang sangat kuat satu sama lain di mana pembangunan manusia pada akhirnya akan memperkuat kondisi ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada diagram di atas. Demikian juga, terciptanya ketahanan pangan yang kokoh di masyarakat akan menunjang pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas.

BAB X

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara absolut, IPM Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan yaitu dari 73,75 pada tahun 2017 menjadi 74,67 pada tahun 2018. Dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Provinsi Jambi, IPM Kota Sungai Penuh menduduki peringkat kedua IPM tertinggi se Provinsi Jambi hingga tahun 2018.
2. Angka Harapan Hidup Masyarakat Kota Sungai Penuh masih di atas rata-rata angka harapan hidup masyarakat Provinsi Jambi dan bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se Provinsi Jambi maka menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kota Jambi.
3. Angka Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Sungai Penuh yang sebesar 14,77 sudah baik bila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah masyarakat Provinsi Jambi. Dimana angka harapan lama sekolah masyarakat Kota Sungai Penuh menempati peringkat pertama tertinggi se-Provinsi Jambi.
4. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Sungai Penuh sebesar 9,84 tahun. Dengan kata lain rata-rata tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat adalah lulusan SMP atau SMA kelas 1. Angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Jambi yang besarnya 8,15 tahun dan berada pada posisi kedua tertinggi dari sebelas Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan manusia mempunyai hubungan negatif yang cukup kuat dengan kemiskinan. Nilai r sebesar $-0,889$ menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM semakin rendah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
6. Hubungan antara IPM dan persentase pekerja di sektor formal adalah positif dengan r sebesar $0,461$ yang menunjukkan bahwa

semakin tinggi nilai IPM di Kota Sungai Penuh, akan semakin tinggi pula persentase pekerja sektor formal. Sektor formal disini didefinisikan dengan pendekatan status bekerja sebagai 'berusaha dengan buruh tetap/buruh dibayar' dan 'buruh/karyawan /pegawai dengan majikan tetap'.

9.2 Saran

1. Perlu kebijakan dan program pembangunan yang terencana, dalam menentukan dan memilih prioritas atas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan manusia tepat sasaran berdasarkan indeks setiap komponen pembentuk IPM.
2. Perlu upaya yang lebih keras lagi dalam program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat, jika ingin mencapai nilai IPM Kota Sungai Penuh lebih meningkat lagi.
3. Perlu dukungan dari pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas sehingga Kota Sungai Penuh dapat melakukan kegiatan pendataan untuk menunjang tersedianya data dasar yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Manusia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2010-2018

No.	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PROVINSI JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.69	69.62	69.99	70.65
2.	KERINCI	65.16	65.85	66.71	67.49	67.96	68.89	69.68	70.03	70.59
3.	MERANGIN	63.85	64.40	65.31	65.82	66.21	67.40	67.86	68.30	68.81
4.	SAROLANGUN	64.64	65.20	66.16	67.13	67.67	68.10	68.73	69.03	69.41
5.	BATANGHARI	65.67	66.32	66.97	67.24	67.68	68.05	68.70	68.92	69.33
6.	MUARO JAMBI	62.84	63.39	64.17	65.14	65.71	66.66	67.55	67.86	68.34
7.	TANJUNG JABUNG TIMUR	57.21	57.77	58.63	59.41	59.88	61.12	61.88	62.61	63.32
8.	TANJUNG JABUNG BARAT	61.49	61.98	62.86	63.54	64.04	65.03	65.91	66.15	67.13
9.	TEBO	63.62	64.45	65.23	65.91	66.63	67.29	68.05	68.16	68.67
10.	BUNGO	66.28	66.70	67.20	67.54	67.93	68.34	68.77	69.04	69.42
11.	KOTA JAMBI	72.23	72.96	73.78	74.21	74.86	75.58	76.14	76.74	77.41
12.	KOTA SUNGAI PENUH	69.91	70.55	71.23	72.09	72.48	73.03	73.35	73.75	74.67

Sumber: BPS 2019

Lampiran 2

PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI 2016-2018

No	Wilayah	IPM			Peringkat Nasional			Peringkat IPM se Provinsi Jambi			Reduksi <i>Shortfall</i>	
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016-2017	2017-2018
1.	PROVINSI JAMBI	69.62	69.99	70.65	19	18	18	4	4	3	1,22	0,66
2.	KERINCI	69.68	70.03	70.59	186	183	-	3	3	4	1,15	0,56
3.	MERANGIN	67.86	68.30	68.81	253	242	-	8	8	8	1,37	0,51
4.	SAROLANGUN	68.73	69.03	69.41	218	211	-	6	6	6	0,96	0,38
5.	BATANGHARI	68.70	68.92	69.33	222	218	-	7	7	7	0,70	0,41
6.	MUARO JAMBI	67.55	67.86	68.34	271	260	-	10	10	10	0,95	0,48
7.	TANJUNG JABUNG TIMUR	61.88	62.61	63.32	482	453	-	12	12	12	1,91	0,72
8.	TANJUNG JABUNG BARAT	65.91	66.15	67.13	343	336	-	11	11	11	0,70	0,99
9.	TEBO	68.05	68.16	68.67	249	247	-	9	9	9	0,34	0,51
10.	BUNGO	68.77	69.04	69.42	215	209	-	5	5	5	0,86	0,38
11.	KOTA JAMBI	76.14	76.74	77.41	62	57	-	1	1	1	2,52	0,67
12.	KOTA SUNGAI PENUH	73.35	73.75	74.67	97	92	-	2	2	2	1,50	0,93

Lampiran 3

ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 2016-2018

No	Wilayah	Angka Harapan Hidup			Peringkat AHH se Provinsi Jambi		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	PROVINSI JAMBI	70.71	70.76	70.89	5	5	5
2.	KERINCI	69.41	69.52	69.65	8	8	8
3.	MERANGIN	70.93	70.94	71.04	3	3	3
4.	SAROLANGUN	68.80	68.83	68.94	9	9	9
5.	BATANGHARI	70.03	70.12	70.26	6	6	6
6.	MUARO JAMBI	70.86	70.90	71.02	4	4	4
7.	TANJUNG JABUNG TIMUR	65.56	65.69	65.86	12	12	11
8.	TANJUNG JABUNG BARAT	67.71	67.75	67.87	10	10	10
9.	TEBO	69.66	69.67	69.77	7	7	7
10.	BUNGO	67.18	67.27	67.42	11	11	12
11.	KOTA JAMBI	72.32	72.33	72.43	1	1	1
12.	KOTA SUNGAI PENUH	71.66	71.71	71.84	2	2	2

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

Lampiran 4

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) 2016-2018

No	Wilayah	Harapan Lama Sekolah			Peringkat HLS se Provinsi Jambi			Rata-Rata Lama Sekolah			Peringkat RLS se Provinsi Jambi		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	KERINCI	13.83	13.84	13.85	2	3	3	8.06	8.19	8.20	3	3	3
2.	MERANGIN	11.87	11.95	11.97	10	10	10	7.44	7.62	7.67	8	7	7
3.	SAROLANGUN	12.23	12.24	12.25	8	9	9	7.34	7.47	7.63	10	9	8
4.	BATANGHARI	12.88	12.89	12.90	4	4	4	7.69	7.77	7.82	6	6	6
5.	MUARO JAMBI	12.79	12.80	12.81	5	5	5	8.02	8.08	8.09	4	4	4
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	11.48	11.80	11.85	11	11	11	6.32	6.33	6.34	11	11	11
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	12.21	12.27	12.60	9	8	6	7.43	7.44	7.56	9	10	10
8.	TEBO	12.36	12.37	12.38	7	7	7	7.54	7.55	7.56	7	8	9
9.	BUNGO	12.55	12.59	12.60	6	6	5	7.99	8.08	8.09	5	5	5
10.	KOTA JAMBI	13.81	14.23	14.62	3	2	2	10.65	10.66	10.67	1	1	1
11.	KOTA SUNGAI PENUH	14.75	14.76	14.77	1	1	1	9.33	9.55	9.84	2	2	2

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

Lampiran 5

DAYA BELI TAHUN 2016-2018

No	Wilayah	Pengeluaran Per kapita (Ribu Rupiah)			Peringkat se Provinsi Jambi		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	KERINCI	9374	9501	9951	8	8	7
2.	MERANGIN	9644	9753	10133	5	5	6
3.	SAROLANGUN	11349	11478	11609	2	2	2
4.	BATANGHARI	9512	9573	9833	7	7	8
5.	MUARO JAMBI	7990	8145	8456	11	11	11
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	8136	8403	8904	10	10	10
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	8872	9004	9395	9	9	9
8.	TEBO	9745	9832	10273	4	4	4
9.	BUNGO	10937	11016	11352	3	3	3
10.	KOTA JAMBI	11436	11648	11912	1	1	1
11.	KOTA SUNGAI PENUH	9604	9707	10186	6	6	5

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019

Lampiran 6

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN KELOMPOK UMUR SEKOLAH
PROVINSI JAMBI 2016-2018**

Kelompok Umur sekolah	Angka Partisipasi Sekolah		
	2016	2017	2018
07-12	99.57	99.59	99.67
13 - 15	95.35	95.89	96.14
16 - 18	71.20	71.54	71.94
19 - 24	23.86	24.12	-

Kabupaten/Kota	13-15				16-18				19-24			
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
KERINCI	0,00	97,62	2,38	100,00	0,00	80,71	19,29	100,00	1,47	32,71	65,82	100,00
MERANGIN	1,46	94,09	4,45	100,00	0,72	65,84	33,44	100,00	0,49	12,47	87,04	100,00
SAROLANGUN	0,00	91,70	8,30	100,00	1,00	62,39	36,61	100,00	0,00	18,52	81,48	100,00
BATANGHARI	0,00	95,82	4,18	100,00	1,14	73,38	25,48	100,00	1,93	17,98	80,09	100,00
MUARO JAMBI	0,00	96,99	3,01	100,00	0,00	77,77	22,23	100,00	1,37	23,13	76,50	100,00
TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	94,10	5,90	100,00	0,00	58,99	41,01	100,00	1,99	20,67	78,34	100,00
TANJUNG JABUNG BARAT	0,79	95,26	3,95	100,00	0,00	71,25	28,75	100,00	0,00	16,35	83,65	100,00
TEBO	0,00	93,60	6,40	100,00	1,99	61,63	36,39	100,00	1,10	26,50	72,40	100,00
BUNGO	0,00	97,67	2,33	100,00	0,48	69,31	30,21	100,00	0,29	20,10	79,61	100,00
KOTA JAMBI	0,00	98,98	1,02	100,00	0,96	80,63	19,42	100,00	0,59	36,88	62,53	100,00
KOTA SUNGAI PENUH	0,00	98,84	1,56	100,00	0,00	86,39	13,61	100,00	0,00	30,42	69,58	100,00

Lampiran 7

**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2018**

No.	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO)			Garis Kemiskinan		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	PROVINSI JAMBI	8.41	8.19	7.92	371875	389596	426251
2.	KERINCI	7.48	7.45	7.07	285406	309941	333978
3.	MERANGIN	9.95	9.43	8.88	325181	347523	374250
4.	SAROLANGUN	9.33	8.87	8.73	386460	393344	403411
5.	BATANGHARI	10.79	10.33	10.23	341320	365365	394438
6.	MUARO JAMBI	4.30	4.37	4.05	255918	295983	353583
7.	TANJUNG JABUNG TIMUR	12.76	12.58	12.38	322389	338963	361574
8.	TANJUNG JABUNG BARAT	11.81	11.32	11.10	303479	314436	348495
9.	TEBO	6.87	6.79	6.58	338160	363698	379390
10.	BUNGO	5.99	5.82	5.78	292573	310428	366226
11.	KOTA JAMBI	8.87	8.84	8.49	397088	413722	466854
12.	KOTA SUNGAI PENUH	3.13	2.78	2.76	317556	334856	351391

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2019